



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022 disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD sebagai salah satu bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan.

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas;
2. Investasi Jangka Pendek;
3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi Jangka Panjang;
6. Aset Tetap;
7. Kewajiban Jangka Pendek;
8. Kewajiban Jangka Panjang; dan
9. Ekuitas.

Laporan Operasional merupakan laporan finansial yang menggambarkan *riil* pendapatan dan beban selama satu tahun anggaran yang mencakup.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

1. Pendapatan-LO;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional; dan
4. Pos luar biasa dan surplus defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut.

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
4. Ekuitas akhir.

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan bagian dari laporan finansial yang berupa informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode TA 2022. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai.

1. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
2. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Bagaimana pembiayaan seluruh kegiatan dan kecukupan Kas;
4. Posisi keuangan dan sumber-sumber penerimaan jangka pendek dan jangka panjang; dan
5. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau selama pelaksanaan APBD TA 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022; dan
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum, Perekonomian Makro Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang kondisi gambaran umum Kabupaten Pulang Pisau, perekonomian makro Kabupaten Pulang Pisau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulang Pisau.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) yang terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban, serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari Ekuitas Awal,



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM, PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM

2.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari terbitnya keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Nomor 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas kemudian menindaklanjuti keputusan DPRD Kabupaten Kapuas tersebut melalui surat Nomor 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah I melalui surat Nomor 1356/II.Pem. perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disusul dengan surat tanggal 4 September 2000 Nomor 135/17/Pem. Perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota ke alamat yang sama seperti tersebut di atas.

Tanggal 11 Maret 2000 dilakukan Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan Undang-undang pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota baru pada 10 provinsi di Indonesia, yang kemudian disusul dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 Kabupaten Baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002.

Pada 16 Mei 2002, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 131.42-187 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Pulang Pisau atas nama Drs. Andris P. Nadjan. Pada 8 Juli 2002, Menteri Dalam Negeri melakukan peresmian atas pembentukan 19 kabupaten dan tiga kota di 10 provinsi di Indonesia termasuk delapan kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Pejabat Bupati di delapan kabupaten baru di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur.

2.1.2 Kondisi Geografi, Demografi

Peta Wilayah Kabupaten Pulang Pisau





Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 9.650,86 km² atau 6,29% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan lahan Kabupaten Pulang Pisau mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

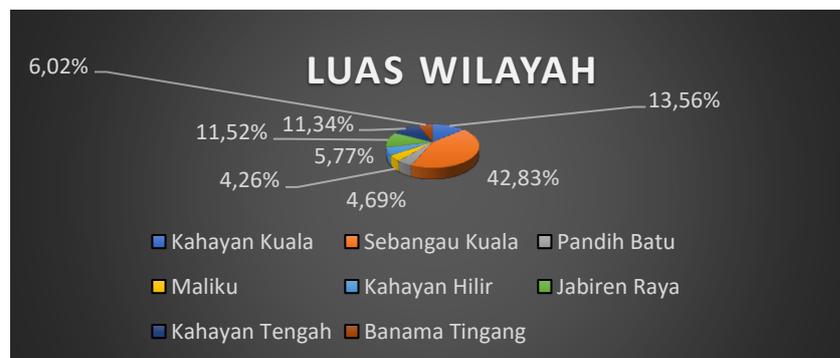
Kabupaten Pulang Pisau berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis terletak antara 113°30'00" - 114°15'00" Bujur Timur dan 1°32'00" - 3°28'00" Lintang Selatan. Kabupaten Pulang Pisau berbatasan langsung dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah timur dan Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara.

Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Maluku, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Kecamatan dengan luas wilayah paling luas adalah Kecamatan Sebangau Kuala dengan luas wilayah 4.133,46 km² atau 42,83% dari seluruh luas Kabupaten Pulang Pisau yaitu 9.650,86 km². Pada tabel dan gambar dibawah ini dapat dilihat luas daerah menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Kahayan Kuala	1.308,83	13,56%
2	Sebangau Kuala	4.133,46	42,83%
3	Pandih Batu	452,76	4,69%
4	Maliku	411,59	4,26%
5	Kahayan Hilir	556,41	5,77%
6	Jabiren Raya	1.112,19	11,52%
7	Kahayan Tengah	1094,31	11,34%
8	Banama Tingang	581,31	6,02%
Pulang Pisau		9.650,86	100%

Proporsi Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau





Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

2.2 PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau yaitu.

- a. Tingkat Kemiskinan data Tahun 2022 sebesar 4,70%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka data Tahun 2022 sebesar 1,96%;
- c. *Gini Ratio* data Tahun 2022 sebesar 0,288%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 sebesar 69,01%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2022 sebesar 4,69%;
- f. Tingkat Inflasi tidak terdata atau tidak ada penghitungan untuk Kab. Pulang pisau akan tetapi ada penghitungan inflasi gabungan dari Kota Palangka Raya dan Kota Sampit sebesar 0,10%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2022 sebesar Rp6464,14 miliar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan, keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat persentase penduduk miskin pada Kabupaten Pulang Pisau dari Tahun 2021 s.d. 2022.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,24	4,70	0,46
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	5,43	6,04	0,61
3	Provinsi (%)	5,16	5,28	0,12
4	Nasional (%)	9,71	9,57	(0,14)
5	Peringkat Provinsi	30	-	-
6	Peringkat Nasional	31	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kal-Teng dan Nasional (Berdasarkan Prosentase kemiskinan tertinggi)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2021 sebesar 4,24% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin mencapai 4,70% dan diharapkan pada Tahun 2023 akan bisa ditekan kembali seperti pada tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pulang Pisau masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Pada tabel-tabel dibawah ini dapat dilihat tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,58	0,76	0,18
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,71	0,92	0,21
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	-	-
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kal-Teng dan Nasional (Berdasarkan Kedalaman Kemiskinan Terendah)

Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,12	0,21	0,09
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,15	0,12	(0,03)
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	-	-
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional (Berdasarkan Keparahan Kemiskinan Terendah)

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari. (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 adalah sebesar 2,60%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,60	1,96	(0,64)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,53	4,26	(0,27)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	-	-
4	Peringkat Provinsi	10	15	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional (Berdasarkan Pengangguran Terbuka Terendah)

TPT di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,96%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,60% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,26%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana.

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Gini Ratio Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021-2022

No	Tingkat Ketimpangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,26	0,29	0,01
2	Tingkat Provinsi	0,32	0,32	-
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	-
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu.

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebesar 69,01 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 s.d. 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,53	69,01	0,48
2	Provinsi	71,25	71,63	0,38
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebesar 69,01 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 68,53 poin mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur Harapan Hidup saat Lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,36 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8,26 tahun dengan harapan lama sekolah 12,5 tahun.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 s.d. 2022

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional (triliun rupiah)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB harga konstan 2010 (miliar rupiah)	3.484,01	3.596,82	3765,49	39.800,00	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,68	3,24	4,69	6,45	3,69
3	Peringkat Provinsi	-	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional

Selama kurun waktu dari Tahun 2020 s.d. 2021 perekonomian Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan 2,68% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau meningkat menjadi sebesar 4,69% yang disebabkan bangkitnya kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID -19 dan sudah tidak ada lagi PPKM.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan dengan lajunya berkisar antara 10% s.d. 30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*), dalam kategori inflasi ini termasuk yang berat dengan mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, diketahui bahwa tingkat inflasi pada Kabupaten Pulang Pisau tidak dilakukan penghitungan tersendiri. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dilakukan di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Pulang Pisau

Struktur perekonomian Kabupaten Pulang Pisau dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Miliar Rupiah Tahun 2020 s.d. 2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.050,31	2.220,86	2.381
2	Pertambangan dan Penggalian	34,42	36,96	39,05
3	Industri Pengolahan	480,97	553,50	625,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	3,78	4,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,53	3,83	4,00
6	Konstruksi	806,95	887,62	984,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	592,21	607,08	664,88
8	Transportasi dan Pergudangan	221,31	229,68	253,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,87	179,99	196,60
10	Informasi dan Komunikasi	75,55	82,07	89,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,13	40,03	42,54
12	Real Estate	108,27	111,72	117,33
13	Jasa Perusahaan	3,70	3,82	4,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345,53	335,33	339,40



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
15	Jasa Pendidikan	426,94	418,36	443,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,59	207,36	224,72
17	Jasa lainnya	45,25	46,70	49,54
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.588,38	5.969,70	6.464,14
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	5.588,38	5.969,70	6.464,14
20	PDRB Provinsi	152.187,40	170.001,20	-
21	PDRB Provinsi tanpa Migas	151.629,10	169.207,90	-
22	PDRB Nasional (triliun rupiah)	15.434,20	16.970,80	-
23	Peringkat Provinsi	13	13	-
24	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Pulang Pisau, Prov Kal-Teng dan Nasional

2.3 PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sejak Tahun 2020, dimana terbentuk 38 SKPD dengan struktur uraian kerja sebagai berikut.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial; dan
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan terdiri atas:
- a. Dinas Perikanan;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pertanian; dan
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
 - g. Kecamatan Kahayan Hilir;
 - h. Kecamatan Jabiren Raya;
 - i. Kecamatan Maluku;
 - j. Kecamatan Pandih Batu;
 - k. Kecamatan Kahayan Kuala;
 - l. Kecamatan Sebangau Kuala;
 - m. Kecamatan Kahayan Tengah;
 - n. Kecamatan Banama Tingang; dan
 - o. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah diukur berdasarkan beberapa komponen utama yaitu Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Transfer Daerah merupakan pengurang kekayaan bersih daerah yang disebabkan karena adanya pengalihan kekayaan kepada pihak lain tanpa mengharapkan adanya imbalan maupun keuntungan dari pengalihan tersebut.

3.1. IKHTISAR REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dianggarkan sebesar Rp993.057.044.186,00 dan terealisasi sebesar Rp1.073.025.872.774,18 atau sebesar 108,05%. Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau terbagi dalam uraian berikut.

3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dianggarkan sebesar Rp67.216.765.185,00 dan terealisasi sebesar Rp128.313.204.639,10 atau sebesar 190,89%.

3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada Tahun 2022, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp925.840.279.001,00 dan terealisasi Rp944.712.668.135,08 atau sebesar 102,04%.

3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi berupa pendapatan hibah dana BOS. Pada Tahun 2022, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00 atau sebesar 00,00%.

3.2. IKHTISAR REALISASI BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dan Transfer Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.001.001.058.920,99 dan terealisasi sebesar Rp897.140.629.798,82 atau sebesar 89,62%. Belanja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 terdiri atas:



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

3.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dianggarkan sebesar Rp775.003.684.170,50 dan terealisasi sebesar Rp676.105.646.057,18 atau sebesar 87,24%.

3.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan komponen terbesar kedua setelah Belanja Pegawai. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp224.905.563.288,49 dan terealisasi sebesar Rp220.244.673.498,64 atau sebesar 97,93%.

3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menganggarkan Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp1.091.811.462,00 dan terealisasi sebesar Rp790.310.243,00 atau 72,39%, yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan pengembalian terhadap tindak lanjut penyetoran sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011.

3.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer Kabupaten Pulang Pisau merupakan belanja yang dianggarkan dengan tujuan untuk menyalurkan dana kepada pemerintah desa. Tahun 2022 dianggarkan Rp141.293.546.800,00 dan terealisasi Rp141.053.546.800,00 atau sebesar 99,83%.

3.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2022 dalam pencapaian target pendapatan maupun belanja telah diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Hambatan dalam Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

- Sulitnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama untuk membayar pajak dan retribusi;
- Belum terdatanya seluruh subyek, obyek, dan Wajib Pajak daerah yang ada;
- Masih terkendala dengan belum tersusunnya pedoman/sisdur *database* potensi dan tata cara merumuskan target pendapatan;
- Belum optimalnya kegiatan pendataan dan penagihan terhadap Obyek Pajak dan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah; dan
- Terbatasnya SDM, Sarana dan Prasarana Pemungutan, dan Jangkauan Wilayah kerja yang cukup luas serta sulit dijangkau sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk menjangkaunya.

3.3.2. Hambatan dalam Pencapaian Target Belanja

- Realisasi Belanja Pegawai tidak tercapai, karena Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja belum bisa direalisasikan.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. PENDAHULUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah menyajikan informasi yang valid dan relevan terkait posisi keuangan SKPKD, SKPD-UPTD, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang meliputi Aset dan Ekuitas dari seluruh transaksi serta kejadian (*events*) yang dilakukan dan terjadi pada entitas SKPKD dan SKPD selama satu tahun periode pelaporan. Periode akuntansi/pelaporan adalah satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2022. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.1.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Pulang Pisau adalah:

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti Laporan Tahunan; dan
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu basis akrual.

4.2. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah.

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari.

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
3. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa.
 - Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL/SAK;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran; dan
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Non-Lancar. Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non-Lancar. Aset Non-Lancar mencakup Aset yang bersifat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non-Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non-Permanen dan Permanen. Investasi Non-Permanen antara lain Investasi dalam Surat Utang Negara, Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, dan Investasi Non-Permanen Lainnya. Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Non-Lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Kerja Sama (kemitraan).

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.2.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Transfer Penerimaan atau Kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk Dana Perimbangan dan Bagi Hasil; dan
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

4.2.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan Kas selama satu periode akuntansi serta saldo Kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan setara Kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran Kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran Kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

4.3. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas sebagai berikut.

4.3.1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.3.2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.3.3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan penerapan basis akrual, Aset dalam bentuk Piutang atau Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

4.3.4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

4.3.5. Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non-Kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4.3.6. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya Kewajiban atau terjadinya konsumsi Aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan klasifikasi Belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan klasifikasi belanja menurut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, maka dilakukan *mapping*/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.4. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.5. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas.

4.5.1. Kemandirian Entitas

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan Aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan Aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.5.2. Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.5.3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.6. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai perolehan;
3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.6.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

4.6.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.6.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai Belanja Daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar Utang. Prinsip layak temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.6.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

4.6.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

4.6.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.7. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu.

4.7.1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.7.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

4.7.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 terbagi menjadi tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Daerah	993.057.044.186,00	1.073.025.872.774,18	108,05	1.023.140.745.924,70
Jumlah	993.057.044.186,00	1.073.025.872.774,18	108,05	1.023.140.745.924,70

Rincian realisasi pendapatan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	67.216.765.185,00	128.313.204.639,10	190,89	125.319.051.700,19
Pendapatan Transfer	925.840.279.001,00	944.712.668.135,08	102,04	877.268.804.189,51
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		20.552.890.035,00
Jumlah	993.057.044.186,00	1.073.025.872.774,18	108,05	1.023.140.745.924,70

Realisasi pendapatan TA 2022 naik sebesar 4,88% atau Rp49.885.126.849,48 dari TA 2021. Peningkatan realisasi pendapatan TA 2022 disebabkan oleh:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdapat peningkatan terutama pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- Pendapatan Transfer terdapat peningkatan terutama pada Dana Insentif Daerah dan Pendapatan Bagi Hasil.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas akun Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	67.216.765.185,00	128.313.204.639,10	190,89	125.319.051.700,19
Jumlah	67.216.765.185,00	128.313.204.639,10	190,89	125.319.051.700,19



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp128.313.204.639,10 dan Rp125.319.051.700,19, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Daerah	26.978.250.320,00	85.181.880.484,10	315,74	50.381.636.194,00
Retribusi Daerah	2.295.978.400,00	2.798.277.761,00	121,88	2.098.379.165,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.942.536.465,00	7.017.720.761,00	141,99	7.370.086.337,00
Lain-lain PAD yang Sah	33.000.000.000,00	33.315.325.633,00	100,96	65.468.950.004,19
Jumlah	67.216.765.185,00	128.313.204.639,10	190,89	125.319.051.700,19

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	6.532.500.000,00	4.744.783.033,00	4.894.044.170,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	25.000.000.000,00	22.977.996.328,00	57.370.136.749,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.000.000,00	31.000.000,00	81.450.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	891.500.000,00	929.853.500,00	682.138.050,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	100.000.000,00	607.607.168,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.500.000,00	48.480.000,00	274.533.200,00
9	Dinas Perikanan	18.000.000,00	1.200.000,00	5.845.000,00
10	Dinas Pertanian	17.500.000,00	6.375.000,00	6.400.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	57.500.000,00	70.744.000,00	72.253.000,00
12	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	155.000.000,00	164.100.000,00	132.010.000,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	36.000.000,00	60.000.000,00	43.500.000,00
14	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.148.286.785,00	98.553.514.810,10	61.650.638.116,19
15	Sekretariat DPRD	20.000.000,00	20.100.000,00	1.800.000,00
16	Kecamatan Kahayan Hilir	34.228.400,00	36.383.000,00	21.179.000,00
17	Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	3.500.000,00	2.400.000,00
18	Kecamatan Maliku	23.500.000,00	14.922.800,00	13.144.515,00
19	Kecamatan Pandih Batu	8.500.000,00	7.200.000,00	7.250.000,00
20	Kecamatan Kahayan Kuala	39.250.000,00	16.220.000,00	15.062.000,00
21	Kecamatan Sebangau Kuala	2.500.000,00	1.600.000,00	1.050.000,00
22	Kecamatan Kahayan Tengah	3.000.000,00	875.000,00	27.217.900,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
23	Kecamatan Banama tingang	3.000.000,00	7.750.000,00	-
Jumlah		67.216.765.185,00	128.313.204.639,10	125.319.051.700,19

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menetapkan terdapat 11 jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp85.181.880.484,10 dan Rp50.381.636.194,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	7.000.000,00	2.400.000,00	34,29	2.100.000,00
Pajak Restoran	895.000.000,00	1.075.693.330,90	120,19	1.017.656.101,20
Pajak Hiburan	10.125.000,00	800.000,00	7,90	2.887.000,00
Pajak Reklame	45.000.000,00	42.458.510,00	94,35	47.722.860,00
Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	3.852.384.124,00	104,12	3.184.852.618,00
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	53.680.500,00	107,36	44.954.317,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.375.000.000,00	2.703.881.522,20	113,85	3.150.631.087,80
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	1.166.876.010,00	77,79	1.152.790.852,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.396.125.320,00	76.283.706.487,00	414,67	41.778.041.358,00
Jumlah	26.978.250.320,00	85.181.880.484,10	315,74	50.381.636.194,00

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 meningkat sebesar 169,07% dibandingkan TA 2021. Peningkatan terbesar terdapat pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 182,59% atau sebesar Rp76.283.706.487,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp41.778.041.358,00.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diatur berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Usaha mencakup retribusi atas Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah, Pemakaian Bangunan/ Gedung/ Rumah/ Dinas/ GOR/ Stadion/ Toko/ Pertokoan, Pemakaian Alat Berat, Penyiaran Radio, Pemakaian Jasa Pelayanan, dan Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.798.277.761,00 dan Rp2.098.379.165,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	531.743.900,00	106,35	486.262.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	48.500.000,00	48.480.000,00	99,96	42.120.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.500.000,00	48.902.000,00	107,48	24.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	59.728.400,00	66.333.000,00	111,06	38.085.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	61.744.000,00	123,49	67.753.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	557.607.168,00	557,61	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	423.000.000,00	410.287.000,00	96,99	403.609.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	120.000.000,00	110.200.000,00	91,83	102.160.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	17.500.000,00	6.375.000,00	36,43	6.400.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	75.000.000,00	93.507.500,00	124,68	47.705.550,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	750.000.000,00	750.750.000,00	100,10	596.790.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.500.000,00	1.200.000,00	48,00	1.395.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	47.500.000,00	68.711.393,00	144,66	266.655.815,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	21.000.000,00	36.694.000,00	174,73	13.642.500,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan	35.750.000,00	5.742.800,00	16,06	0,00
Jumlah	2.295.978.400,00	2.798.277.761,00	121,88	2.098.379.165,00

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 121,88% dibandingkan TA 2021 terutama pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagi laba Penyertaan Modal untuk BUMD antara lain Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PDAM, dan Jamkrida. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2022 sebesar Rp7.017.720.761,00, dengan rincian deviden dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp7.017.720.761,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.942.536.465,00	7.017.720.761,00	141,99	7.370.086.337,00
Jumlah	4.942.536.465,00	7.017.720.761,00	141,99	7.370.086.337,00

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.315.325.633,00 dan Rp65.468.950.004,19 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	718.058.223,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.429.298.888,65	121,46	2.238.494.618,60
Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	41.693.326,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.434.194.022,87	0,00	787.884.949,84
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	314.676.325,00	0,00	64.007.542,75
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	56.616.494,00	0,00	74.480.051,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	61.200,00	0,00	700.800,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.169.889.451,48	0,00	514.685.097,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	22.977.996.328,00	91,91	57.370.136.749,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.000.000.000,00	4.164.534.700,00	69,41	4.364.466.870,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00
Jumlah	33.000.000.000,00	33.315.325.633,00	100,96	65.468.950.004,19

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	890.840.279.001,00	897.586.211.735,00	100,76	846.046.861.021,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.000.000.000,00	47.126.456.400,08	134,65	31.221.943.168,51
Jumlah	925.840.279.001,00	944.712.668.135,08	102,04	877.268.804.189,51

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Perimbangan	796.138.445.001,00	791.268.335.735,00	99,39	716.095.211.021,00
Dana Insentif Daerah (DID)	15.187.638.000,00	26.803.680.000,00	176,48	33.207.666.000,00
Dana Desa	79.514.196.000,00	79.514.196.000,00	100,00	96.743.984.000,00
Jumlah	890.840.279.001,00	897.586.211.735,00	100,76	846.046.861.021,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp791.268.335.735,00 dan Rp716.095.211.021,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	73.969.161.000,00	92.746.070.977,00	125,38	69.363.964.375,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.935.820.000,00	19.410.917.902,00	195,36	18.234.181.854,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	3.872.480.000,00	4.732.636.148,00	122,21	4.657.911.189,00
DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	60.160	0,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.000,00	0,00	0,00	83.253.036,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.424.086.000,00	204.030.000,00	14,33	113.037.009,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.279.000,00	4.240.280,00	129,32	36.068.697.835,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	51.352.513.000,00	61.013.264.647,00	118,81	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.422.671.000,00	5.422.671.000,00	100,00	8.837.392.028,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.369.491.424,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	515.815.678.001,00	515.284.162.032,00	99,90	515.062.491.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	515.815.678.001,00	515.284.162.032,00	99,90	515.062.491.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	102.953.549.000,00	96.772.954.708,00	94,00	50.900.102.470,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.079.980.000,00	2.062.965.000,00	99,18	1.104.402.550,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.977.718.000,00	10.913.934.864,00	99,42	4.816.465.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.227.709.000,00	4.189.691.939,00	99,10	6.179.165.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	285.117.250,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.974.210.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	6.002.448.154,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.286.572.000,00	3.462.763.494,00	105,36	676.985.656,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	18.030.715.000,00	15.896.846.754,00	88,17	808.279.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	138.684.000,00	131.542.800,00	94,85	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	892.254.000,00	653.545.000,00	73,25	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	2.097.201.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	8.004.264.000,00	7.284.020.200,00	91,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pembangunan Pertanian				
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.994.750.000,00	4.956.592.750,00	99,24	1.032.234.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.530.214.000,00	10.503.800.000,00	99,75	7.870.789.250,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	11.781.618.000,00	11.654.300.000,00	98,92	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.774.059.000,00	5.736.799.000,00	99,35	3.612.774.310,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.012.416.000,00	4.012.416.000,00	100,00	2.096.065.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.226.412.000,00	7.838.830.000,00	95,29	14.441.166.600,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.600.000.000,00	2.595.812.700,00	99,84	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.210.189.000,00	4.304.797.032,00	102,25	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.088.794.000,00	574.297.175,00	52,75	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.400.057.000,00	86.465.148.018,00	83,62	80.768.653.176,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	20.418.390.000,00	17.813.906.693,00	87,24	
DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.825.173.000,00	45.726.670.420,00	84,95	55.823.153.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.136.000.000,00	980.250.000,00	45,89	1.025.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.787.108.000,00	3.677.994.300,00	76,83	2.239.818.600,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.840.770.000,00	225.700.000,00	7,95	2.277.300.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	58.480.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.486.542.000,00	14.602.470.755,00	94,29	16.382.057.936,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	374.435.000,00	191.632.050,00	51,18	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.103.759.000,00	2.017.355.800,00	95,89	1.471.010.040,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	895.040.600,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	335.173.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	516.800.000,00	376.568.000,00	0,00	222.000.000,00
Jumlah	796.138.445.001,00	791.268.335.735,00	99,39	716.095.211.021,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Dana BOS berubah menjadi bagian dari Pendapatan DAK Non Fisik dimana sebelumnya dicatat dalam pendapatan Lainnya berdasarkan pada PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sehingga Kabupaten Pulang Pisau tidak lagi mencatat pendapatan Dana BOS pada Pendapatan Lainnya.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	15.187.638.000,00	26.803.680.000,00	33.207.666.000,00
Dana Desa	79.514.196.000,00	79.514.196.000,00	96.743.984.000,00
Jumlah	94.701.834.000,00	106.317.876.000,00	129.951.650.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	15.187.638.000,00	26.803.680.000,00	176,48	33.207.666.000,00
Jumlah	15.187.638.000,00	26.803.680.000,00	176,48	33.207.666.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Desa	79.514.196.000,00	79.514.196.000,00	100	96.743.984.000,00
Jumlah	79.514.196.000,00	79.514.196.000,00	100	96.743.984.000,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	35.000.000.000,00	47.126.456.400,08	134,65	31.221.943.168,51
Jumlah	35.000.000.000,00	47.126.456.400,08	134,65	31.221.943.168,51

Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021 masing-masing terinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.510.436.530,00	5.244.045.927,98	116,26	4.784.659.989,47
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.888.758.973,00	5.893.946.202,08	120,56	4.937.170.117,80



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.638.893.813,00	26.362.355.846,73	141,44	14.252.306.885,64
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	29.457.100,00	31.374.870,29	106,51	10.031.315,60
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.932.453.584,00	9.594.733.553,00	138,40	7.237.774.860,00
Jumlah	35.000.000.000,00	47.126.456.400,08	134,65	31.221.943.168,51

5.1.1.2.3. Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk TA 2022 dan 2021 tidak ada target dan realisasi Bantuan Keuangan.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk TA 2022 tidak ada target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Hibah Dana Bos TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	20.552.890.035,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	20.552.890.035,00

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dibagi menjadi tiga komponen yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja	1.001.001.058.920,99	897.140.629.798,82	89,62	785.113.578.849,10
Jumlah	1.001.001.058.920,99	897.140.629.798,82	89,62	785.113.578.849,10

Rincian Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Operasi	775.003.684.170,50	676.105.646.057,18	87,24	598.943.659.881,10
Belanja Modal	224.905.563.288,49	220.244.673.498,64	97,93	179.733.214.814,00
Belanja Tidak Terduga	1.091.811.462,00	790.310.243,00	72,39	6.436.704.154,00
Jumlah	1.001.001.058.920,99	897.140.629.798,82	89,62	785.113.578.849,10

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp329.683.273.923,00 dan Rp353.942.748.132,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	226.441.751.538,46	216.415.342.657,00	95,57	219.153.756.613,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	42.808.325.783,16	31.435.898.276,00	73,43	29.868.439.311,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	83.127.254.912,83	68.774.996.057,00	82,73	94.523.858.516,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.650.412.957,50	10.125.655.349,00	95,07	9.868.931.081,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	92.959.751,00	81.923.995,00	88,13	116.882.611,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	999.105.160,20	610.880.000,00	61,14	410.880.000,00
Belanja Pegawai BLUD	4.018.000.000,00	2.238.577.589,00	55,71	0,00
Jumlah	368.137.810.103,15	329.683.273.923,00	89,55	353.942.748.132,00

Pada Belanja Pegawai Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 terdapat Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Kabupaten Pulang Pisau yang dianggarkan sebesar Rp4.018.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.238.577.589,00.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan pada **Lampiran 1**.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp333.194.564.335,18 dan Rp236.005.947.559,10 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	109.851.577.082,42	104.062.418.574,00	94,73	69.163.705.743,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.372.468,00	38.820.000,00	89,50	0,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Jasa Kantor	56.381.233.531,52	51.664.219.421,67	91,63	49.522.055.744,35
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.212.934.306,00	2.474.399.792,00	77,01	-
Belanja Sewa Tanah	164.883.000,00	163.880.000,00	99,39	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	466.355.400,00	413.634.134,00	88,69	354.525.625,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	161.000.000,00	129.850.000,00	80,65	247.686.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	3.000.000,00	85,71	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.939.781.353,00	21.291.826.780,00	97,05	17.237.515.880,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	280.000.000,00	229.536.700,00	81,98	522.680.000,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	8.600.000,00	8.600.000,00	100	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.789.722.022,00	4.434.115.965,00	92,57	2.720.138.386,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	121.806.000,00	121.786.000,00	99,98	114.837.000,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	522.473.300,00	465.424.000,00	89,08	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.721.255.108,00	5.081.220.118,00	88,81	5.358.120.339,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.320.987.115,00	4.255.142.570,00	98,48	4.331.246.570,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.142.744.200,00	29.090.279.795,00	99,82	11.583.187.000,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-	39.998.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.533.257.170,95	57.253.386.121,00	91,56	52.343.305.122,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.567.003.500,00	1.267.000.000,00	80,85	148.475.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.029.551.000,00	4.995.461.540,00	99,32	1.726.270.350,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.418.390.000,00	16.277.700.008,51	79,72	20.592.200.799,75
Belanja Barang dan Jasa BLUD	63.796.816.648,46	29.472.862.816,00	46,20	0,00
Jumlah	390.477.243.205,35	333.194.564.335,18	85,33	236.005.947.559,10

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2022 berdasarkan SKPD dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah	15.788.630.862,00	12.811.867.799,00	81,15	8.422.764.190,00
Jumlah	15.788.630.862,00	12.811.867.799,00	81,15	8.422.764.190,00

Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.899.250.000,00	0,00	0,00	245.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang	11.634.145.770,00	11.597.500.770,00	99,69	7.186.807.161,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	315.000.000,00	295.000.000,00	93,65	162.500.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	299.390.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	540.235.092,00	519.367.029,00	96,14	519.367.029,00
Jumlah	15.788.630.862,00	12.811.867.799,00	81,15	8.422.764.190,00

Daftar penerima realisasi Belanja Hibah tersaji pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan Belanja Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM dan Bantuan Sosial uang yang diserahkan kepada individu ke mahasiswa. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	415.940.000,00	69,32	572.200.000,00
Jumlah	600.000.000,00	415.940.000,00	69,32	572.200.000,00

Daftar penerima Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM per Kecamatan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Rp/Orang	Jumlah Penerima	Total Realisasi (Rp)
1	Kahayan Hilir	600.000,00	34	20.400.000,00
2	Sebangau Kuala	600.000,00	47	28.200.000,00
3	Kahayan Tengah	600.000,00	130	78.000.000,00
4	Banama Tingang	600.000,00	119	71.400.000,00
Total			330	198.000.000,00

Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM bagi Pelaku Usaha Sektor Transportasi Penyeberangan Sungai sebesar Rp18.000.000,00. Sedangkan untuk Bantuan Sosial uang yang diserahkan kepada individu ke mahasiswa senilai Rp184.940.000,00 untuk Mahasiswa D3 dan S1 dan Rp15.000.000,00 untuk Mahasiswa S2.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal	224.905.563.288,49	220.244.673.498,64	97,93	179.733.214.814,00
Jumlah	224.905.563.288,49	220.244.673.498,64	97,93	179.733.214.814,00

Rincian Belanja Modal TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.963.617.950,49	28.676.649.006,19	99,01	25.152.026.214,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.482.075.587,00	73.112.943.643,72	99,50	56.575.882.640,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.633.060.338,00	117.448.436.859,73	96,56	96.171.172.860,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.999.413,00	359.833.989,00	1.199,47	115.842.100,00
Jumlah	224.905.563.288,49	220.244.673.498,64	97,93	179.733.214.814

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00
Jumlah	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Lapangan	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00
Jumlah	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD masing-masing sebagai berikut.

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00
	Jumlah	796.810.000,00	646.810.000,00	81,17	1.718.291.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4.1**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.963.617.950,49	28.676.649.006,19	99,01	25.152.026.214,00
Jumlah	28.963.617.950,49	28.676.649.006,19	99,01	25.152.026.214,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Alat Bantu	94.087.200,00	73.993.200,00	78,64	1.300.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.925.191.982,66	4.813.141.012,75	97,72	6.253.116.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	180.000.000,00	179.709.000,00	99,84	79.794.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,01	-	-	-
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	12.934.700,00	9.261.000,00	71,60	-
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	80.600,00	-	-	-
Belanja Modal Alat Ukur	94.926.000,00	87.253.320,00	91,92	10.819.309,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	109.419.054,00	108.140.000,00	98,83	850.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	369.374.300,00	2.346.612.104,00	635,29	261.255.600,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.804.492.139,00	4.187.253.305,44	87,15	5.208.193.098,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	516.529.225,00	510.998.430,00	98,93	661.487.050,00
Belanja Modal Alat Studio	377.414.151,82	357.950.518,00	73,07	710.307.200,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	229.250.000,00	228.700.350,00	99,76	454.172.200,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	91.227.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	9.262.238.340,00	8.578.735.607,00	92,62	6.391.159.154,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	400.000.000,00	50.555.000,00	12,64	484.015.780,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.518.076.300,00	1.510.380.928,00	99,49	-
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	100,00	353.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000.000,00	499.278.000,00	99,86	-
Belanja Modal Komputer Unit	3.030.838.494,00	2.640.735.431,00	87,13	3.221.666.238,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	607.036.300,00	563.460.950,00	92,82	837.174.085,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	179.981.500,00	179.210.450,00	99,57	-
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	13.000.800,00	12.900.000,00	99,22	-
Belanja Modal Alat Pelindung	14.551.464,00	14.440.400,00	99,24	-
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60	-
Belanja Modal Peralatan Olahraga	80.595.400,00	80.400.000,00	99,76	131.989.500,00
Jumlah	28.963.617.950,49	28.676.649.006,19	99,01	25.152.026.214,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4.2**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.482.075.587,00	73.112.943.643,72	99,50	56.575.882.640,00
Jumlah	73.482.075.587,00	73.112.943.643,72	99,50	56.575.882.640,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.592.002.628,00	66.268.389.207,72	99,51	51.456.858.940,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.757.431.859,00	3.727.263.046,00	99,20	4.165.967.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.132.641.100,00	3.117.291.390,00	99,51	953.056.700,00
Jumlah	73.482.075.587,00	73.112.943.643,72	99,50	56.575.882.640,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	14.635.575.850,00	14.560.650.000,00	13.109.543.865,00
2	Dinas Kesehatan	6.675.430.110,00	6.647.286.620,00	12.285.738.457,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	27.536.058.500,00	27.398.690.053,00	9.836.084.118,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.606.838.859,00	15.534.865.480,00	15.857.037.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	39.878.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	801.481.300,00	799.569.000,00	541.350.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.600.556.001,00	1.599.099.700,00	-
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	160.000.000,00	159.694.000,00	347.223.700,00
9	Dinas Perhubungan	153.005.767,00	152.587.000,00	660.630.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	79.800.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.000.300,00	41.922.000,00	58.922.000,00
13	Dinas Perikanan	515.000.000,00	510.420.000,00	245.400.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	131.536.000,00	131.300.000,00	264.550.000,00
15	Dinas Pertanian	584.614.000,00	582.298.000,00	224.925.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	798.023.000,00	791.216.044,72	259.505.000,00
17	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.750.000.000,00	1.734.704.046,00	413.375.000,00
18	Inspektorat	1.461.954.000,00	1.444.808.500,00	199.524.500,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	121.850.000,00
20	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	165.360.800,00	163.850.000,00	249.250.000,00
21	Sekretariat DPRD	453.550.000,00	450.550.000,00	1.567.056.000,00
22	Kecamatan Maluku	-	-	14.240.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	411.091.100,00	409.433.200,00	200.000.000,00
Jumlah		73.482.075.587,00	73.112.943.643,72	56.575.882.640,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4.3**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.633.060.338,00	117.448.436.859,73	96,56	96.171.172.860,00
Jumlah	121.633.060.338,00	117.448.436.859,73	96,56	96.171.172.860,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Jalan	84.960.881.050,00	82.185.159.897,73	96,73	57.213.929.750,00
Belanja Modal Jembatan	945.000.000,00	941.800.000,00	99,66	5.884.175.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	30.421.429.333,00	29.684.923.412,00	97,58	23.954.830.200,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	236.249.955,00	235.600.000,00	99,72	392.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.039.500.000,00	1.035.686.000,00	99,63	1.525.915.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	-	5.896.740.410,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	4.030.000.000,00	3.365.267.550,00	83,50	1.303.582.500,00
Jumlah	121.633.060.338,00	117.448.436.859,73	96,56	96.171.172.860,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	7.700.000,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	18.846.700,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.190.000.000,00	1.187.539.800,00	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	300.000.000,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.438.124.038,00	111.559.224.909,73	92.388.414.160,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	7.700.000,00	-
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.915.936.300,00	3.908.195.000,00	3.471.672.000,00
7	Dinas Perikanan	600.000.000,00	597.088.150,00	-
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	194.650.000,00
9	Dinas Pertanian	189.000.000,00	188.689.000,00	-
10	Inspektorat	-	-	97.590.000,00
Jumlah		121.633.060.338,00	117.448.436.859,73	96.171.172.860,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4.4**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.999.413,00	359.833.989,00	1.199,47	115.842.100,00
Jumlah	29.999.413,00	359.833.989,00	1.199,47	115.842.100,00

Pelampauan anggaran disebabkan karena Dinas Pendidikan belum menganggarkan belanja buku. Proses penganggaran Belanja Dana Bos belum mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dari masing-masing sekolah. Selain itu Dinas Pendidikan juga tidak mengusulkan perubahan anggaran pada APBD Perubahan.

Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	29.999.413,00	359.833.989,00	1199,47	
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	-	-	-	25.245.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	-	-	-	47.350.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	43.247.100,00
Belanja Modal Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Jumlah	29.999.413,00	359.833.989,00	1199,47	115.842.100,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan dalam tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	331.973.989,00	-
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	14.250.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.999.413,00	27.860.000,00	28.997.100,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	72.595.000,00
Jumlah		29.999.413,00	359.833.989,00	115.842.100,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 berdasarkan SKPD disajikan di **Lampiran 4.5**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan belanja yang digunakan untuk tanggap darurat Bencana Banjir dan pengembalian terhadap tindak lanjut penyetoran sisa dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Tahun 2011. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	1.091.811.462,00	790.310.243,00	72,39	6.436.704.154,00
Jumlah	1.091.811.462,00	790.310.243,00	72,39	6.436.704.154,00

Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.1.3. Transfer

Transfer Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Transfer	141.293.546.800,00	141.053.546.800,00	99,83	155.121.684.800,00
Jumlah	141.293.546.800,00	141.053.546.800,00	99,83	155.121.684.800,00

Rincian Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	140.655.546.800,00	140.415.546.800,00	99,83	154.483.684.800,00
Jumlah	141.293.546.800,00	141.053.546.800,00	99,83	155.121.684.800,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00
Jumlah	638.000.000,00	638.000.000,00	100,00	638.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	140.655.546.800,00	140.415.546.800,00	99,83	154.483.684.800,00
Jumlah	140.655.546.800,00	140.415.546.800,00	99,83	154.483.684.800,00

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	-
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.935.738.400,00	2.935.738.400,00	100,00	4.757.839.800,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	240.000.000,00	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	137.234.808.400,00	137.234.808.400,00	-	149.725.845.000,00
Jumlah	140.655.546.800,00	140.415.546.800,00	99,83	154.483.684.800,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi TA 2022 terealisasi sebesar Rp245.000.000,00 sedangkan untuk Tahun 2021 tidak ada dikarenakan akun ini sudah dipindahkan ke Belanja Hibah Bantuan keuangan.

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.935.738.400,00 dan Rp4.757.839.800,00 untuk TA 2021 berupa premi askes untuk masyarakat.

5.1.3.2.3. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 terealisasi sebesar Rp137.234.808.400,00 dan Rp149.725.845.000,00 untuk TA 2021. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari yaitu.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa)	-	-	147.245.545.000,00
Bantuan Keuangan Kepada Desa (insentif Damang, Martir, Tunjangan Kehormatan LPMK, dll)	-	-	2.480.300.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	25.789.108.000,00	25.789.108.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	111.445.700.400,00	111.445.700.400,00	-
Jumlah	137.234.808.400,00	137.234.808.400,00	149.725.845.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	152.237.561.534,99	153.231.129.156,19	100,65	72.325.646.880,60
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67	2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	149.237.561.534,99	151.231.129.156,19	101,34	70.325.646.880,60

Penerimaan Pembiayaan merupakan SiLPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2021 yang dianggarkan pada TA 2022 sebesar Rp152.237.561.534,99 dan terealisasi sebesar Rp153.231.129.156,19 yang terdiri atas:

- Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.571.816.648,46;
- Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp107.665.744.886,53;
- Kas Bendahara JKN sebesar Rp118.442.040,32; dan
- Kas Bendahara BOS sebesar Rp875.125.580,88.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 berupa penanaman modal BUMD pada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp2.000.000.000,00.

5.1.5. SILPA

SiLPA Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 sebesar Rp186.062.825.331,55 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah (Bank Pembangunan Kalteng Cabang Pulang Pisau)	85.409.654.649,06	58.761.685.495,57
Kas di Kas Daerah (Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Pulang Pisau)	59.576.221.573,94	42.064.790.249,94
Kas di Kas Daerah (PT Bank Mandiri Persero Cabang Kuala Kapuas)	287.974.013,07	285.109.812,02
Kas di Kas Daerah (BNI Capem Pulang Pisau)	5.461.874.254,00	6.554.159.329,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	-
Kas JKN	2.675.062,65	118.442.040,32
Kas BOS	95.752.927,37	875.125.580,88
Kas BLUD	35.208.672.851,46	44.571.816.648,46
Kas Lainnya	-	-
Total	186.062.825.331,55	153.231.129.156,20

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Periode tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	153.231.129.156,20	72.326.307.056,60
Penggunaan SAL	153.231.129.156,20	72.326.307.056,60
Sub Total		
Sisa Lebih/(kurang) Pembiayaan Anggaran	186.062.825.331,55	153.231.129.156,20
Saldo Anggaran Lebih Akhir	186.062.825.331,55	153.231.129.156,20

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (Awal)

Saldo Anggaran Lebih (awal) merupakan SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu. Saldo Anggaran Lebih (awal) untuk periode tahun sebelumnya yang berakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp153.231.129.156,20.

5.2.2. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)

Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih antara Surplus/Defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SILPA untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Desember 2022 dan tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp186.062.825.331,55 dan Rp153.231.129.156,20.

5.2.3. Saldo Anggaran Lebih (Akhir)

Saldo Anggaran Lebih (akhir) merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. SILPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp186.062.825.331,55 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah – Bank BPK	85.409.654.649,06
Kas di Kas Daerah – Bank BRI	59.576.221.573,94
Kas di Kas Daerah - Bank Mandiri	287.974.013,07
Kas di Kas Daerah - BNI	5.461.874.254,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000
Kas JKN	2.675.062,65
Kas BOS	95.752.927,37
Kas BLUD	35.208.672.851,46
Total	186.062.825.331,55

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021. Neraca Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 terdiri atas komponen Aset sebesar Rp2.321.494.831.352,80 kemudian Kewajiban sebesar Rp10.049.069.017,24 serta Ekuitas sebesar Rp2.311.445.762.335,56.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Aset	2.321.494.831.352,80	2.143.405.333.355,79	8,31	182.148.293.698,59
Kewajiban	10.049.069.017,24	21.411.655.657,50	(53,07)	(10.718.911.640,26)
Ekuitas	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	192.867.205.338,85

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 memiliki aset sebesar Rp2.321.494.831.352,80 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.143.405.333.355,79.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Aset Lancar	326.996.453.095,04	404.987.191.397,88	(19,26)	(77.990.738.302,84)
Investasi Jangka Panjang	38.728.667.471,21	39.404.454.771,21	(1,72)	(675.787.300,00)
Aset Tetap	1.887.960.047.315,87	1.682.463.211.935,33	12,21	205.496.835.380,54
Aset Lainnya	67.809.663.470,68	16.550.475.251,37	309,71	51.259.188.219,31
Jumlah	2.321.494.831.352,80	2.143.405.333.355,79	8,31	178.089.497.997,01

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah Aset yang diklasifikasikan diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari Kas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencatat Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp326.996.453.095,04 turun sebesar Rp77.990.738.302,84 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp404.987.191.397,88 yang disebabkan oleh kenaikan nilai kas dan Persediaan.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas	186.137.740.178,55	153.238.301.282,20	21,47	32.899.438.896,35
Piutang	82.791.975.702,77	194.608.638.415,99	(57,46)	(111.816.662.713,22)
Penyisihan piutang	(14.002.947.787,25)	(7.568.555.486,43)	85,01	(6.434.392.300,82)
Persediaan	72.069.685.000,97	64.708.807.186,12	11,38	7.360.877.814,85
Jumlah	326.996.453.095,04	404.987.191.397,88	(19,26)	(77.990.738.302,84)

5.3.1.1.1. Kas

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara Pengeluaran pada SKPD, Bendahara Penerimaan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD, Bendahara Dana BOS di sekolah-sekolah dan Bendahara Dana JKN, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di Kas Daerah	150.735.724.490,07	107.665.744.886,53	40,00	43.069.979.603,54
Kas di Bendaharan Pengeluaran	20.000.000,00			20.000.000,00
Kas di BLUD	35.208.672.851,46	44.571.816.648,46	(21,01)	(9.363.143.797,00)
Kas Dana JKN	2.675.062,65	118.442.040,32	(97,74)	(115.766.977,68)
Kas Dana BOS	95.752.927,37	875.125.580,88	(89,06)	(779.372.653,51)
Kas Lainnya	74.914.847,00	7.172.126,00	944,53	67.742.721,00
Koreksi Saldo Awal Kas JKN pada Januari 2023		0,01		-
Jumlah	186.137.740.178,55	153.238.301.282,20	21,47	32.899.438.896,35

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di Kas Daerah	150.735.724.490,07	107.665.744.886,53	140,00	43.069.979.603,54

Saldo Kas Daerah merupakan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.735.724.490,07 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.665.744.886,53 yang disimpan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Rakyat Indonesia cabang Pulang Pisau, Bank Mandiri cabang Kapuas, dan Bank BNI cabang Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Bank Pembangunan Kalimantan Tengah No. Rekening 601-001-000000003-3	85.409.654.649,06	58.761.685.495,57	45,35	26.647.969.153,49
Rekening Bank Nasional Indonesia	59.576.221.573,94	42.064.790.249,94	41,63	17.511.431.324,00
Rekening Bank Mandiri Cabang Kuala Kapuas Nomor Rekening 159-00-0182496-9	287.974.013,07	285.109.812,02	1,00	2.864.201,05
Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Pulang Pisau Nomor rek. 360501000265304	5.461.874.254,00	6.554.159.329,00	(16,67)	(1.092.285.075,00)
Jumlah	150.735.724.490,07	107.665.744.886,53	40,00	43.069.979.603,54

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan Pada per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Bendahara Pengeluaran terdapat pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang tersimpan pada rekening BOK Puskesmas Sebangau sebesar Rp20.000.000,00.

5.3.1.1.1.4. Kas BLUD

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau membentuk BLUD berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 334 Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan BUD pada RSUD Pulang Pisau yang berlaku efektif sejak Januari 2017. Kas BLUD RSUD Kab. Pulang Pisau TA 2022 sebesar Rp35.208.672.851,46, sedangkan TA 2021 sebesar Rp44.571.816.648,46 yang tersimpan dalam rekening nomor 6010102000879 an Bendahara Penerimaan BLUD.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas di BLUD (rekening Bank Kalimantan Tengah Nomor 6010102000879)	35.208.672.851,46	44.571.816.648,46	(21,01)	(9.363.143.797,00)

Dari tabel di atas mutasi saldo kas BLUD tersaji pada tabel berikut ini.

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Awal Kas BLUD	44.571.816.648,46
Pendapatan BLUD	22.977.996.328,00
Belanja BLUD	32.341.140.125,00
Saldo Akhir Kas BLUD	35.208.672.851,46

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.1.1.5. Kas Dana JKN

Kas di Bendahara Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.675.062,65 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp118.442.040,32. Saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN terdapat pada 12 Puskesmas di seluruh Kabupaten Pulang Pisau, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	No Rekening (Bank Kalteng)	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Puskesmas Bahaur Hilir	601012000702	172.171,40	251,40
Puskesmas Bahaur Tengah	601012000717	3.562,40	19.787.597,40
Puskesmas Pangkoh	601012000706	1075,5	59,50
Puskesmas Maluku	601012000715	1.821,00	69.138.200,00
Puskesmas Sebangau	601012000714	1.962,00	0,00
Puskesmas Pulang Pisau	601012000706		164,67
Puskesmas Bereng	601012000704	889.758,60	13.753.347,60
Puskesmas Jabiren	601012000720	2.703,70	19.729,70
Puskesmas Bukit Rawi	601012000712	50.507,65	15.524.170,65



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	No Rekening (Bank Kalteng)	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Puskesmas Bawan	601012000710	8.399,60	33,60
Puskesmas Tangkahan	601012000699	31.548,80	31.548,80
Puskesmas Tahai	601012001188	1.511.552,00	186.937,00
Saldo Kas JKN		2.675.062,65	118.442.040,32

Rincian Kas Dana JKN dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.1.1.1.6. Kas Dana Bos

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk Hibah. Kas Dana Bos direalisasikan pada Tahun 2022 sebesar Rp95.752.927,37 yang terdiri dari.

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Awal Kas Dana BOS	875.125.580,88
Penerimaan Dana BOS	17.813.906.693,00
Belanja Dana BOS	18.593.279.346,51
Saldo Akhir Kas Dana BOS	95.752.927,37

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo awal dana BOS sebesar Rp875.125.580,88, ditambah dengan pendapatan dana BOS pada tahun 2022 sebesar Rp17.813.906.693,00 dikurangi dengan belanja dana BOS tahun 2022 sebesar Rp18.593.279.346,51, sehingga saldo kas dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.752.927,37 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp875.125.580,88. Daftar saldo Kas dana pada rekening sekolah dan rincian saldo Dana Bos tersaji pada **Lampiran 8.1 dan Lampiran 8.2**.

5.3.1.1.1.7. Kas Lainnya

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kas lainnya	74.914.847,00	7.172.126,00	944,53	67.742.721,00

Kas Lainnya Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.914.847,00 merupakan Pajak Dana BOS yang belum disetorkan ke Kas Negara yang terdapat pada beberapa sekolah berikut ini.

No	Sekolah	Nilai Pajak
1	SDN GARUNG – 1	115.449,00
2	SDN ANJIR PULANG PISAU - 1	470.000,00
3	SDN MANTAREN – 1	193.828,00
4	SDN PULANG PISAU – 2	3.794.010,00
5	SDN PULANG PISAU – 7	2.146.038,00
6	SMPN - 2 KAHAYAN HILIR	4.863.882,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Sekolah	Nilai Pajak
7	SMPN - 4 KAHAYAN HILIR	6.643.501,00
8	SDN MANGGURUH	15.000,00
9	SDN BERENG RAMBANG - 1	2.690.486,00
10	SMPN - 1 KAHAYAN TENGAH	8.326.586,00
11	SDN MALIKU BARU – 4	1.850.150,00
12	SDN SEI BARU TEWU – 1	65.946,00
13	SDN TAHAI JAYA – 1	1.165.950,00
14	SDN PADURAN MULYA – 1	139.443,00
15	SDN LAWANG URU – 1	11.013.073,00
16	SDN LAWANG URU – 2	3.195.091,00
17	SDN PAPUYU PUDAK	308.065,00
18	SDN BUKIT LITI – 1	4.155.542,00
19	SDN PETUK LITI – 1	1.575.398,00
20	SMPN - 2 KAHAYAN TENGAH	11.930.705,00
21	SDN GANDANG – 3	1.229.160,00
22	SDN KANAMIT – 3	33.311,00
23	SDN DANDANG – 1	4.735.022,00
24	SDN DANDANG – 4	372.654,00
25	SDN MEKAR JAYA	1.329.253,00
26	SDN PADURAN SEBANGAU - 2	661.837,00
27	SDN SEBANGAU PERMAI - 1	1.895.467,00
TOTAL		74.914.847,00

5.3.1.1.2. Piutang

Piutang adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 adalah sebesar Rp82.791.975.702,77 sedangkan piutang TA 2021 adalah Rp194.608.638.415,99, nilai Piutang tersebut merupakan nilai perolehan piutang dikurangi dengan pembayaran piutang. Terjadi penurunan Piutang dari TA 2021 ke TA 2022 hal itu disebabkan karena belum tercatatnya Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi yang belum dirilis.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Pendapatan	82.565.674.032,77	193.729.836.341,99	(57,38)	(111.164.162.309,22)
Piutang Lainnya	172.203.900,00	759.826.700,00	(77,34)	(587.622.800,00)
Beban Dibayar Dimuka	54.097.770,00	118.975.374,00	(54,53)	(64.877.604,00)
Jumlah	82.791.975.702,77	194.608.638.415,99	(57,46)	(111.816.662.713,22)

5.3.1.1.2.1. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.565.674.032,77 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp193.729.836.341,99 dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Pajak	69.320.452.829,00	175.333.019.491,00	(60,46)	(106.012.566.662,00)
Piutang Restribusi	497.804.533,00	497.804.533,00	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang sah	1.289.206.495,40	4.673.876.691,20	(72,42)	(3.384.670.195,80)
Piutang Dana Bagi Hasil	11.458.210.175,37	13.225.135.626,79	(13,36)	(1.766.925.451,42)
Jumlah	82.565.674.032,77	193.729.836.341,99	(57,38)	(111.164.162.309,22)

Rincian saldo piutang pendapatan dijelaskan sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.351.730,00			
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	9.397.836.585,00	8.993.824.693,00	4,49	404.011.892,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	59.916.264.514,00	166.339.194.798,00	(63,98)	(106.422.930.284,00)
Jumlah	69.320.452.829,00	175.333.019.491,00	(60,46)	(106.018.918.392,00)

1) Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan piutang yang muncul karena pajak Kegiatan Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan oleh sekolah bersumber dari Dana BOS akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp6.351.730,00. Daftar sekolah tersaji pada tabel berikut ini.

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Pajak Daerah
1	2	3	4
1	SDN LAWANG URU – 1	BANAMA TINGANG	1.155.000,00
2	SDN LAWANG URU – 2	BANAMA TINGANG	212.500,00
3	SDN PAPUYU PUDAK	KAHAYAN KUALA	168.000,00
4	SDN BUKIT LITI – 1	KAHAYAN TENGAH	1.022.500,00
5	SDN PETUK LITI - 1	KAHAYAN TENGAH	1.020.000,00
6	SMPN - 2 KAHAYAN TENGAH	KAHAYAN TENGAH	1.059.840,00
7	SDN GANDANG - 3	MALIKU	582.890,00
8	SDN DANDANG - 1	PANDIH BATU	215.000,00
9	SDN MEKAR JAYA	SEBANGAU KUALA	587.600,00
10	SDN PADURAN SEBANGAU - 2	SEBANGAU KUALA	153.400,00
11	SDN SEBANGAU PERMAI - 1	SEBANGAU KUALA	175.000,00
			6.351.730,00

2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 merupakan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dialihkan sebagai Pajak Daerah dari KPP Pratama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: BA-33/WPJ.29/KP.03/2014. Piutang PBB per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.397.836.585,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Piutang	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Ketetapan TA 2022 (Rp)	Realisasi pembayaran piutang TA 2022 (Rp)	Saldo Piutang 2022 (Rp)
Tunggakan PBB tahun 2008	504.127.272,00		3.042.970,00	501.084.302,00
Tunggakan PBB tahun 2009	988.244.001,00		4.158.672,00	984.085.329,00
Tunggakan PBB tahun 2010	1.038.638.142,00		4.127.066,00	1.034.511.076,00
Tunggakan PBB tahun 2011	947.224.108,00		4.617.095,00	942.607.013,00
Tunggakan PBB tahun 2012	1.052.592.027,00		5.014.164,00	1.047.577.863,00
Tunggakan PBB tahun 2013	713.897.813,00		7.986.289,00	705.911.524,00
Tunggakan PBB tahun 2014	394.278.315,00		2.892.845,00	391.385.470,00
Tunggakan Tahun 2015	606.549.913,00		3.048.384,00	603.501.529,00
Tunggakan Tahun 2016	304.705.674,00		2.853.950,00	301.851.724,00
Tunggakan Tahun 2017	432.009.710,00		4.339.451,00	427.670.259,00
Tunggakan TA 2018	460.235.573,00		9.469.497,00	450.766.076,00
Tunggakan TA 2019	495.784.482,00		12.572.173,00	483.212.309,00
Ketetapan Tahun 2020	484.627.041,00		15.135.127,00	469.491.914,00
Ketetapan Tahun 2021	570.910.622,00		81.862.355,00	489.048.267,00
Ketetapan Tahun 2022		1.570.887.902,00	1.005.755.972,00	565.131.930,00
Total Piutang	8.993.824.693,00	1.570.887.902,00	1.166.876.010,00	9.397.836.585,00

3) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Piutang BPHTB per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp166.339.194.798,00. Piutang PBB ini muncul karena adanya perbedaan penghitungan *Self Assesment* oleh perusahaan dengan *Official Assesment* oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. SKPD kurang bayar yang menetapkan nilai BPHTB sebesar Rp185.818.012.096,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp154.556.728.601,00 yang disebabkan karena adanya data baru berupa SK Hak Guna Usaha yang mengoreksi luasan lahan dan SPPT PBB tahun terbit SK Hak Guna Usaha yang mengoreksi NJOP sebagai dasar penghitungan BPHTB, perbedaan tersebut terjadi karena perusahaan tidak menyampaikan laporan perhitungan *Self Assesment* kepada BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, dan luasan pengajuan Hak Guna Usaha diperoleh setelah adanya SKPD Kurang Bayar di terbitkan. SKPD kurang bayar tersebut kemudian di koreksi dengan menggunakan SK Bupati Nomor 322 Tahun 2022 tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SKPD BPHTB) PT.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BERKAH ALAM FAJARMAS (BAF) nomor 03/SKPD BPHTB/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dan SK Bupati Nomor 566 Tahun 2022 Tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SKPD-BPHTB) PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA (SCP) nomor 02/SKPD BPHTB/IX/2021 tanggal 23 september 2021, kemudian PT SCP dan PT BERKAH ALAM FAJARMAS (BAF) melakukan pembayaran piutang masing-masing sebesar Rp73.498.200.000,00 dan Rp 1.658.484.823,00 sehingga tersisa piutang sebesar Rp59.916.264.514,00. Rincian perhitungan piutang tersebut disajikan pada **Lampiran 8.3**.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah pada RSUD Pulang Pisau. Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	460.304.533,00	460.304.533,00	-	-
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-
Jumlah	497.804.533,00	497.804.533,00	-	-

1) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Piutang Retribusi IMB muncul sebagai akibat dari perizinan IMB untuk pendirian bangunan sarang burung walet. Piutang retribusi IMB per 31 Desember 2022 sama dengan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp460.304.533,00 dimana tidak terdapat penambahan Piutang Retribusi baru TA 2022.

No	Tahun	Nilai Piutang	Pembayaran	Sisa Piutang
1	2016	638.951.896,00	73.877.000,00	565.074.896,00
2	2017	855.467.118,00	349.767.819,00	505.699.299,00
3	2018	502.699.299,00	33.094.766,00	469.604.533,00
4	2019	472.604.533,00	12.300.000,00	460.304.533,00
5	2020	460.304.533,00	0,00	460.304.533,00
6	2021	460.304.533,00	0,00	460.304.533,00

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Sah	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-
Jumlah	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang sah merupakan piutang yang muncul karena adanya kerja sama atas sewa ruang ATM di Rumah Sakit Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No	Tahun	No PKS	Tarif Sewa ATM (Rp)	Penyetoran (Rp)	Piutang (Rp)	Tanggal Penyetoran (Rp)
1	2013	61/TU/RSUD-PP/UM/I-2013	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	-
2	2014	61/TU/RSUD-PP/UM/I-2013				
3	2015	09/TU/RSUD-PP/UM/I/2015	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	16 January 2015
4	2016	09/TU/RSUD-PP/UM/I/2015				
5	2017	440/014/PKS/RSUD-PP/I-2017	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	08 May 2017
6	2018	440/ /PKS/RSUD-PP/I-2018	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	06 April 2018
7	2019	440/046/PKS/RSUD-PP/I-2019	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	13 February 2019
8	2020	440/004/PKS/RSUD-PP/I-2020	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22 January 2020
9	2021	440/188/PKS/RSUD-PP/I-2021	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-
Jumlah			137.500.000,00	100.000.000,00	37.500.000,00	

Untuk tahun 2013 dan 2021, belum terdapat pembayaran sewa ruang ATM tersebut oleh Bank Kalteng masing-masing sebesar Rp17.500.000,00 dan Rp20.000.000,00. sehingga jumlah piutang sewa ruang ATM pada RSUD Pulang Pisau sebesar Rp37.500.000,00.

c. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp1.289.206.495,40 lebih kecil bila dibandingkan dengan Piutang TA 2021 sebesar Rp4.673.876.691,20, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo Piutang Tahun 2021	Koreksi Piutang	Pembayaran Piutang	Penambahan Piutang	Saldo Piutang Tahun 2022
Piutang Bunga				15.658.168,93	15.658.168,93
Piutang Denda Restribusi	596.382.800,20	0	0	110.517.454,27	706.900.254,47
Piutang pelayanan BLUD RSUD Pulang Pisau	4.077.493.891,00	(151.171,00)	4.077.645.062,00	566.648.072,00	566.648.072,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Piutang Lain-lain PAD yang sah	4.673.876.691,20	(151.171,00)	4.077.645.062,00	692.823.695,20	1.289.206.495,40
--------------------------------	------------------	--------------	------------------	----------------	------------------

Penjelasannya terinci sebagai berikut

1) Piutang Denda Retribusi IMB

Piutang Denda Retribusi IMB muncul sebagai akibat dari tidak terbayarnya retribusi IMB selama satu tahun anggaran oleh pengusaha sarang burung walet. Saldo Piutang Denda IMB tahun 2021 adalah sebesar Rp596.382.800,20 terdapat penambahan Piutang Denda Retribusi IMB pada TA 2022 sebesar Rp110.517.454,27, sehingga total Piutang Denda Retribusi IMB adalah Rp706.900.254,47.

No	Tahun	Penambahan Denda (Rp)	Piutang Denda (Rp)
1	2016	14.056.077,00	14.056.077,00
2	2017	137.227.223,09	151.283.300,09
3	2018	113.301.137,29	264.584.437,38
4	2019	110.763.454,27	375.347.891,65
5	2020	110.517.454,27	485.865.345,93
6	2021	110.517.454,27	596.382.800,20
7	2022	110.517.454,27	706.900.254,47

2) Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Pulang Pisau

Piutang pelayanan kesehatan BLUD RSUD Pulang Pisau muncul disebabkan karena keterlambatan pembayaran klaim yang diajukan oleh BLUD RSUD Pulang Pisau ke BPJS, Perusahaan dan jasa asuransi lainnya. Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD masuk dalam kategori Piutang Lain-lain PAD yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 334 Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan BUD pada RSUD Pulang Pisau yang berlaku efektif sejak Januari 2017. Piutang BLUD RSUD Pulang Pisau terinci sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Layanan Umum	14.178.687,00	37.272.261,00		
Piutang BPJS	275.077.385,00	4.120.000,00	6.576,64	70.957.385,00
Klaim Covid	277.392.000,00	4.036.101.630,00	(93,13)	(3.758.709.630,00)
Piutang Pendapatan	566.648.072,00	4.077.493.891,00	(86,10)	(3.487.752.245,00)

3) Piutang Bunga

Piutang Bunga terbentuk karena adanya remunerasi atas pembukaan *Tresury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia Kabupaten Pulang Pisau oleh Kementerian Keuangan. Nilai piutang Remunerasi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.658.168,93.

d. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil

Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/128/2022 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang Disalurkan pada Tahun Anggaran



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

2023 dimana Dana Bagi Hasil yang masih belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp11.458.210.175,37. Sedangkan untuk piutang tahun 2021 adalah sebesar Rp13.225.135.626,79, Piutang Dana Bagi Hasil Pajak ini terdiri atas rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	-	1.287.257.490,00	(100,00)	(1.287.257.490,00)
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.337.232.588,43	11.937.878.136,79	(88,80)	(10.600.645.548,36)
Piutang Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.622.345.660,57	-	-	1.622.345.660,57
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	38.346.874,99	-	-	38.346.874,99
Piutang Dana Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.460.285.051,38	-	-	8.460.285.051,38
Jumlah	11.458.210.175,37	13.225.135.626,79	(13,36)	(1.766.925.451,42)

Piutang TA 2021 tersebut telah dibayar pada tahun 2022 dengan bukti pembayaran berikut.

Tanggal	No Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
17 Maret 2022	00593/PT-PROV/BPPKAD/III/2022	Transfer DBH Pajak Rokok TW IV 2021	1.287.257.490,00
27 April 2022	02045/PT-PROV/BPPKAD/IV/2022	Transfer DBH Pajak Daerah Provinsi Tahap III TA 2021	11.937.878.136,79
Jumlah			Rp13.225.135.626,79

5.3.1.1.2.2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.203.900,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp759.826.700,00. Piutang lain-lain Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari rekening Piutang Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan Dinas Pendidikan, Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan BPPKAD dan, piutang TASPEN. Penjelasan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan Dinas Pendidikan	68.750.000,00	58.750.000,00	17,02	10.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Perbendaharaan BPPKAD	14.527.000,00	18.527.000,00	(21,59)	(4.000.000,00)
Piutang Taspem	88.926.900,00	117.969.700,00	(24,62)	(29.042.800,00)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa		564.580.000,00	(100,00)	(564.580.000,00)
Jumlah	172.203.900,00	759.826.700,00	(77,34)	(587.622.800,00)

1) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Dinas Pendidikan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.750.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.750.000,00. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang yang muncul akibat adanya kas di brankas Dinas Pendidikan yang hilang Tahun 2011 dan ditetapkan sebagai tagihan jangka panjang dengan ketentuan bahwa mantan Bendahara Dinas Pendidikan membayar sebesar Rp1.250.000,00 setiap bulannya (Rp15.000.000,00/tahun) sampai dengan tagihan tersebut terlunasi. Berikut ini jumlah perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan.

Debitur	Saldo bagian lancar tuntutan perbendaharaan TA 2021 (Rp)	Realisasi pembayaran bagian lancar perbendaharaan TA 2022 (Rp)	Sisa bagian lancar tuntutan perbendaharaan tahun 2021(Rp)	Reklasifikasi ke bagian lancar tuntutan perbendaharaan per 31 desember 2022 (Rp)	Saldo bagian lancar tuntutan perbendaharaan TA 2022 (Rp)
Tuntutan Perbendaharaan	58.750.000,00	5.000.000,00	53.750.000,00	15.000.000,00	68.750.000,00

2) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan BPPKAD

Bagian lancar tuntutan perbendaharaan BPPKAD berdasarkan atas LHP Inspektorat atas Penyeteroran Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan tahun 2021 berdasarkan LHP Nomor 700/01/LHP-K/ITKAB-PP/XII/2021 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp30.027.000,00, telah dibayar sebagian sebesar Rp15.500.000,00 sehingga Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.527.000,00

3) Piutang PT TASPEN

Piutang PT Taspem merupakan piutang yang muncul sejak Tahun 2012, dimana piutang ini muncul disebabkan oleh beberapa hal :

- (1) SKPD terlambat dalam memberikan informasi tentang status pegawai yang pensiun;
- (2) SK Pensiun untuk pejabat Esselon II ditandatangani oleh presiden, dimana prosedur antara pengajuan SK dengan turunnya SK bisa memakan waktu hingga 12 bulan sehingga selama SK tersebut belum di terima oleh Bidang Perbendaharaan, maka gaji pegawai yang bersangkutan masih dibayar secara penuh; dan
- (3) Munculnya SOP PT Taspem yang menyebutkan bahwa maksimal gaji pegawai yang digantikan oleh PT Taspem untuk dibayarkan ke Pemerintah Daerah maksimal hanya 30% dari gaji pokok.

Dari berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Piutang PT Taspem tersaji dengan rincian berikut.

Uraian Piutang	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi Pengurangan Piutang TA 2022(Rp)	Realisasi Pembayaran Piutang TA 2022 (Rp)	Saldo (Rp)
Piutang TASPEN	117.969.700,00	0,00	29.042.800,00	88.926.900,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.3.1.1.2.3. Penyisihan Piutang

Saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.002.947.787,25 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.568.555.486,43. Penyisihan Piutang dihitung didasarkan pada umur Piutang dan mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sesuai dengan kebijakan akuntansi Kabupaten Pulang Pisau Penyisihan Piutang di kategorikan menjadi empat klasifikasi yaitu sebagai berikut.

- 0-1 Tahun (Lancar);
- 1-3 Tahun (kurang Lancar);
- 3-5 Tahun (Diragukan); dan
- 5 Tahun < (Macet).

Dari dasar tersebut maka diperoleh Akumulasi Penyisihan Piutang Kabupaten Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Penyisihan Piutang PBB	(7.300.204.159,60)	(7.151.557.206,00)	2,08	(148.646.953,60)
Penyisihan Piutang BPHTB	(5.991.626.451,40)			(5.991.626.451,40)
Penyisihan Pendapatan Lain-lain (Taspen)	(58.984.850,00)	(58.984.850,00)	-	-
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Perbendaharaan	(19.327.700,00)	(5.875.000,00)	228,98	(13.452.700,00)
Penyisihan Piutang IMB	(460.304.532,80)	(230.152.266,40)	100,00	(230.152.266,40)
Penyisihan Piutang Denda IMB	(172.500.093,45)	(121.986.164,03)	41,41	(50.513.929,42)
Akumulasi Penyisihan Piutang	(14.002.947.787,25)	(7.568.555.486,43)	85,01	(6.434.392.300,82)

5.3.1.1.2.4. Beban dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban Dibayar Dimuka Kabupaten Pulang Pisau berupa Beban Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar TA 2022 namun memiliki jangka pembebanan selama 12 bulan berikutnya. Beban Dibayar Dimuka TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp54.097.770,00 yang terdapat pada SKPD berikut ini.

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.992.471,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	3.993.512,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.816.024,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.863.496,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.798.237,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.576.682,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Jumlah
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.785.272,00
8	Dinas Perikanan	2.565.850,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	865.100,00
10	Dinas Pertanian	7.673.132,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	585.906,00
12	Inspektorat	3.051.452,00
13	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	979.319,00
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.060.636,00
15	Sekretariat DPRD	9.492.400,00
16	Kecamatan Kahayan Hilir	3.947.259,00
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.051.022,00
Jumlah		54.097.770,00

5.3.1.1.3. Persediaan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencatat persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.069.685.000,97 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.708.807.186,12. Nilai persediaan pada akhir tahun meliputi persediaan barang habis pakai, barang cetakan dan benda berharga, alat listrik dan elektronik, alat kebersihan, obat, oksigen, alat kesehatan, obat pertanian dan peternakan, laboratorium, radiologi, makanan, tanaman dan barang lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Persediaan Alat Tulis Kantor	205.281.112,50	276.072.674,00	(25,64)	(70.791.561,50)
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	29.411.763,00	34.836.850,00	(15,57)	(5.425.087,00)
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	6.532.000,00	12.185.000,00	(46,39)	(5.653.000,00)
Persediaan Perabot Kantor	78.445.739,50	103.664.490,00	(24,33)	(25.218.750,50)
Suku Cadang Lainnya		5.721.800,00	(100,00)	(5.721.800,00)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.816.250,00			32.816.250,00
Persediaan Isi tabung gas	550.000,00	420.000,00	30,95	130.000,00
Persediaan Bahan obat-obatan	3.745.230.229,73	3.661.425.992,49	2,29	83.804.237,24
Persediaan Bahan kimia	151.384.139,00	58.926.780,00	156,90	92.457.359,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	41.813.778,61	8.129.351,00	414,36	33.684.427,61
Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	67.673.491.863,63	60.369.708.923,63	12,10	7.303.782.940,00
Persediaan Barang Cetakan Lainnya	104.728.125,00	177.715.325,00	(41,07)	(72.987.200,00)
Jumlah	72.069.685.000,97	64.708.807.186,12	11,38	7.360.877.814,85

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan yaitu persediaan dicatat berdasarkan perhitungan/inventarisasi fisik persediaan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

yang dilakukan pada akhir periode. Sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah menggunakan pelaporan persediaan dengan periode triwulan. Persediaan disajikan sebesar harga akhir apabila diperoleh dengan pembelian dan persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO). Adapun data persediaan terdapat pada SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	38.366.050,00	6.600.000,00
Dinas Kesehatan	2.754.087.065,38	2.197.110.944,23
Rumah Sakit Umum Daerah	1.284.900.055,50	1.489.274.601,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.147.445.765,63	50.127.365.825,63
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.800.000,00	777.330.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	856.000,00	350.000,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	530.000,00	0
Dinas Sosial	1.925.000,00	1.713.913,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.087.000,00	1.762.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.566.400,00	1.399.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.346.710,00	2.030.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	23.327.100,00	45.428.700,00
Dinas Lingkungan Hidup		0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.808.383,00	179.092.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	855.700,00	1.441.900,00
Dinas Perhubungan	2.230.500,00	1.577.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu		0
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.865.200,00	2.415.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.941.600,00	8.810.550,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.648.000,00	29.996.500,00
Dinas Perikanan	33.282.271,96	46.051.080,01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		200.000,00
Dinas Pertanian	360.667.000,00	9.181.826.840,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	215.000,00	870.000,00
Sekretariat Daerah	15.300.900,00	256.874.000,00
Sekretariat DPRD	362.500,00	500.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	8.098.400,00	8.674.800,00
Kecamatan Jabiren Raya	2.547.500,00	896.000,00
Kecamatan Maliku	794.000,00	716.000,00
Kecamatan Pandih Batu	790.000,00	785.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.818.000,00	2.020.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	222.000,00	271.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	621.200,00	819.000,00
Kecamatan Banama Tingang	2.507.000,00	1.888.000,00
Inspektorat Daerah	6.069.800,00	8.902.350,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.268.313,00	6.527.950,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	286.174.386,50	315.305.032,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.360.200,00	1.981.000,00
Jumlah	72.069.685.000,97	64.708.807.186,12

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.281.112,50. Uraian persediaan masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	7.684.500,00	6.600.000,00
Dinas Kesehatan	27.889.100,00	23.259.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	14.001.152,00	28.731.482,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.071.900,00	15.558.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	530.000,00	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	711.000,00	350.000,00
Dinas Sosial	1.925.000,00	1.083.913,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	791.000,00	1.241.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.566.400,00	1.163.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.957.250,00	1.663.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	21.456.600,00	37.448.100,00
Dinas Lingkungan Hidup		0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.996.528,00	39.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	279.700,00	526.900,00
Dinas Perhubungan	1.435.000,00	1.115.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.365.200,00	2.215.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.941.600,00	3.012.550,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.451.000,00	17.064.000,00
Dinas Perikanan	117.493,50	8.293.400,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		200.000,00
Dinas Pertanian	391.000,00	540.500,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	215.000,00	160.000,00
Sekretariat Daerah	12.433.500,00	6.794.000,00
Sekretariat DPRD	362.500,00	500.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	3.959.900,00	5.553.800,00
Kecamatan Jabiren Raya	2.547.500,00	896.000,00
Kecamatan Maliku	564.000,00	716.000,00
Kecamatan Pandih Batu	622.000,00	735.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.290.000,00	1.350.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	222.000,00	271.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	621.200,00	819.000,00
Kecamatan Banama Tingang	2.397.000,00	1.888.000,00
Inspektorat Daerah	2.860.500,00	2.605.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.105.400,00	4.673.350,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41.053.989,00	57.184.079,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.465.200,00	1.981.000,00
Jumlah	205.281.112,50	276.072.674,00

2) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Uraian Persediaan alat listrik dan elektronik ini terdapat pada SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	-	-
Dinas Kesehatan	2.847.000,00	450.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	6.077.583,00	-
Dinas Sosial	-	500.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	225.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	140.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.460,00	-
Dinas Ketahanan Pangan	575.000,00	4.815.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.010.780,00	4.988.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.000,00	310.000,00
Dinas Perhubungan	242.500,00	135.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga		1.980.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95.000,00	2.981.000,00
Dinas Perikanan	184.000,00	72.500,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		235.000,00
Sekretariat Daerah	1.669.400,00	792.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	1.465.000,00	1.071.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	200.000,00	355.000,00
Kecamatan Maliku	130.000,00	
Inspektorat Daerah	131.500,00	716.550,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	194.000,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	193.940,00	544.200,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aset Daerah	13.035.600,00	14.526.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	75.000,00	
Jumlah	29.411.763,00	34.836.850,00

3) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Uraian persediaan perangko, materai dan benda pos Lainnya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	300.000,00	1.100.000,00
Dinas Sosial		130.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		50.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000,00	150.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.000.000,00	710.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000,00	180.000,00
Dinas Perhubungan	350.000,00	150.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	500.000,00	200.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga		2.158.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00	500.000,00
Dinas Perikanan	600.000,00	2.925.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	400.000,00	800.000,00
Kecamatan Maliku	100.000,00	
Kecamatan Pandih Batu	140.000,00	50.000,00
Kecamatan Banama Tingang	110.000,00	
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.000.000,00	1.160.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	82.000,00	142.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	250.000,00	
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000,00	1.780.000,00
Jumlah	6.532.000,00	12.185.000,00

4) Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih

Persediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih TA 2022 terbagi pada SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	5.471.800,00	2.076.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	31.722.690,00	23.826.560,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.735.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		296.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	70.000,00	
Dinas Ketahanan Pangan	295.500,00	2.455.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		46.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.000,00	217.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.488.175,00	18.812.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	411.000,00	325.000,00
Dinas Perhubungan		177.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1.660.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.602.000,00	9.451.500,00
Dinas Perikanan	1.092.100,00	1.389.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		475.000,00
Sekretariat Daerah		886.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.273.500,00	1.250.000,00
Kecamatan Pandih Batu	28.000,00	
Kecamatan Kahayan Kuala	328.000,00	315.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	451.000,00	
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.110.300,00	1.914.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		663.400,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.032.674,50	32.694.130,00
Jumlah	78.445.739,50	103.664.490,00

5) Persediaan Isi Tabung Gas

Persediaan Isi Tabung Gas pada TA 2022 dan TA 2021 terdapat di SKPD Rumah Sakit Umum Daerah, Persediaan TA 2022 sebesar Rp550.000,00 dan TA 2021 sebesar Rp420.000,00.

6) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya terdapat pada OPD berikut ini.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	30.681.550,00
Dinas Kesehatan	280.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	296.000,00
Dinas Perhubungan	203.000,00
Sekretariat Daerah	1.198.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	157.700,00
Jumlah	32.816.250,00

7) Persediaan Suku Cadang Lainnya

Tidak ada saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya TA 2022 akan tetapi pada TA 2021 terdapat saldo Persediaan Suku Cadang Lainnya pada SKPD Dinas Perikanan dengan nilai sebesar Rp 5.721.800,00.

8) Persediaan Obat

Persediaan Obat terdapat pada SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	2.663.934.665,38	2.165.255.944,23
Rumah Sakit Umum Daerah	1.069.389.391,35	1.369.240.428,25
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.940.400,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.312.900,00	
Dinas Perikanan	1.000.000,00	27.649.380,01
Dinas Pertanian		93.483.840,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		100.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	729.273,00	505.000,00
Inspektorat	864.000,00	1.251.000,00
Jumlah	3.745.230.229,73	3.661.425.992,49

Terdapat persediaan Obat yang sudah *expired date* dimana berdasarkan pada PSAP 05 menyatakan bahwa barang persediaan dalam kondisi rusak tidak lagi dilaporkan dalam neraca, akan tetapi tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Obat *expired date* tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan yaitu pada gudang farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp409.901.339,80 dan puskesmas-puskesmas di wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp146.520.907,87. Obat dan *expired date* juga terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah yaitu untuk obat sebesar Rp249.436.499,92 dan Alat Bahan Habis Pakai (ABHP) sebesar Rp71.393.068,53.

9) Persediaan Bahan Laboratorium dan Bahan Kimia

Pada TA 2022 terdapat saldo persediaan bahan kimia sebesar Rp151.384.139,00 terdapat pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp149.719.139,00 untuk Bahan Kimia dan Bahan Kimia Nuklir sebesar Rp1.665.000,00 sedangkan Pada TA 2021 sebesar Rp58.926.780,00.

10) Persediaan Bahan Makanan Pokok



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Persediaan bahan makanan pokok Kabupaten Pulang Pisau merupakan persediaan berupa bahan makanan mentah untuk diolah pada instalasi gizi sebagai makanan pasien di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dimana pada TA 2022 masih terdapat saldo persediaan sebesar Rp11.775.100,15 dan juga Pakan Ternak di Dinas Perikanan sebesar Rp30.038.678,46 sedangkan untuk TA 2021 sebesar Rp8.129.351,00 di Rumah Sakit Umum Daerah.

11) Persediaan Barang yang akan diserahkan pada Pihak Ketiga

Persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga muncul karena masih terdapat saldo barang yang belum selesai atau siap untuk diserahkan kepada masyarakat atau berita acara penghibahan belum selesai diproses dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.141.373.865,63	50.103.132.425,63
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18.800.000,00	777.330.000,00
Dinas Pertanian	360.276.000,00	9.087.802.500,00
Sekretariat Daerah		248.402.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	153.041.998,00	153.041.998,00
Jumlah	67.673.491.863,63	60.369.708.923,63

Persediaan barang diserahkan pada pihak ketiga terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum merupakan bangunan tempat ibadah dan bangunan lain yang dibangun dengan tujuan diperuntukan untuk masyarakat, sedangkan untuk Dinas Pertanian merupakan pembuatan sumur bor, Jalan Usaha Tani, Embung, DAM irigasi yang diperuntukkan untuk masyarakat.

12) Persediaan Barang Cetakan Lainnya

Persediaan Barang Cetakan Lainnya terdapat pada beberapa SKPD berikut ini.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	53.364.500,00	4.970.000,00
Dinas Perikanan	250.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		115.412.500,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	103.500,00	1.254.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.010.125,00	56.078.825,00
Jumlah	104.728.125,00	177.715.325,00

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non-Permanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non-Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat memperjualbelikan atau menarik kembali.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Jumlah Investasi Permanen	38.728.667.471,21	39.404.454.771,21	(1,72)	(675.787.300,00)
Jumlah	38.728.667.471,21	39.404.454.771,21	(1,72)	(675.787.300,00)

5.3.1.2.1. Investasi Permanen

Investasi Permanen Kabupaten Pulang Pisau diberikan kepada beberapa Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum, PT JAMKRIDA dan PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Investasi Permanen Kabupaten Pulang Pisau pada TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp38.728.667.471,21 dan Rp39.404.454.771,21 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Penyertaan Modal PDAM	4.728.667.471,21	6.404.454.771,21	(26,17)	(1.675.787.300,00)
Penyertaan Modal Bank Kalteng	33.000.000.000,00	32.000.000.000,00	3,13	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal JAMKRIDA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
Jumlah	38.728.667.471,21	39.404.454.771,21	(1,72)	(675.787.300,00)

5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum

Nilai penyertaan modal Perusahaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Perusahaan Air Minum Daerah pada TA 2022 sebesar Rp4.728.667.471,21. Nilai tersebut adalah besaran nilai investasi yang telah disesuaikan dengan pencatatan neraca berdasarkan metode ekuitas dengan kepemilikan modal 100%. Besaran nilai investasi tersebut disesuaikan atas perhitungan laporan keuangan dari PDAM mulai tahun 2014 sampai dengan 2021 yang telah dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
1	Penanaman Modal dalam bentuk uang	13.250.000.000,00
	s/d 2013	2.250.000.000,00
	2014	1.000.000.000,00
	2015	1.000.000.000,00
	2016	1.000.000.000,00
	2017	1.000.000.000,00
	2018	1.000.000.000,00
	2019	3.000.000.000,00
	2020	1.000.000.000,00
	2021	1.000.000.000,00
	2022	1.000.000.000,00
2	Penanaman Modal Dalam Bentuk Barang	14.543.958.294,00
	Hibah dari Kabupaten Induk	3.061.878.294,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah
	2014	175.180.000,00
	2015	293.060.000,00
	2016	1.226.240.000,00
	2017	4.402.650.000,00
	2018	5.384.950.000,00
3	Penanaman Modal dalam bentuk Bahan Kimia	342.848.900,00
	s/d 2013	115.449.000,00
	2014	84.730.000,00
	2015	44.869.900,00
	2016	47.900.000,00
	2017	49.900.000,00
4	Jumlah Penanaman Modal	28.136.807.194,00
	Jumlah Laba/Rugi PDAM	-23.408.139.722,79
	s/d 2013	-5.194.622.505,00
	2014	-655.932.425,00
	2015	-1.431.486.370,80
	2016	-788.904.821,17
	2017	-1.310.987.611,77
	2018	-1.209.207.226,00
	2019	-1.553.432.214,05
	2020	-1.705.317.783,00
	2021	-6.882.461.466,00
	2022	-2.675.787.300,00
	Jumlah Penanaman Modal (Bersih)	4.728.667.471,21

5.3.1.2.1.2. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

a) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah

Investasi Permanen Bank Pembangunan Kalimantan Tengah disajikan dengan perhitungan sebagai berikut.

Tahun Penyertaan	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Jumlah Modal Yang Diterima Tahun Ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal S/D Tahun Ini (Rp)
2002	100.000.000,00	-	100.000.000,00
2003	100.000.000,00	-	200.000.000,00
2004	150.000.000,00	-	350.000.000,00
2005	-	-	350.000.000,00
2006	1.000.000.000,00	-	1.350.000.000,00
2007	250.000.000,00	-	1.600.000.000,00
2008	750.000.000,00	-	2.350.000.000,00
2009	-	-	2.350.000.000,00
2010	1.250.000.000,00	-	3.600.000.000,00
2011	800.000.000,00	-	4.400.000.000,00
2012	1.000.000.000,00	-	5.400.000.000,00
2013	1.500.000.000,00	-	6.900.000.000,00
2014	3.000.000.000,00	-	9.900.000.000,00
2015	2.000.000.000,00	-	11.900.000.000,00
2016	10.000.000.000,00	-	21.900.000.000,00
2017	3.000.000.000,00	-	24.900.000.000,00
2018	-	-	24.900.000.000,00
2020	6.100.000.000,00	-	31.000.000.000,00
2021	1.000.000.000,00	-	32.000.000.000,00
2022	1.000.000.000,00	-	33.000.000.000,00

Jadi total Investasi Permanen TA 2022 adalah sebesar Rp33.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki 3,30% saham atau sebesar 2.490 lembar saham Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Investasi pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dicatat dengan menggunakan metode biaya,



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

dimana investasi dicatat sebesar penanaman modal, tidak dipengaruhi oleh hasil investasi.

b) PT Jamkrida

Investasi pada PT Jamkrida adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, karena Kabupaten Pulang Pisau baru melakukan investasi pada tahun 2015 dan tidak ada investasi untuk TA 2022 ke PT Jamkrida. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 100 lembar saham pada PT Jamkrida dimana sama seperti pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tanah	116.697.951.642,58	117.051.590.142,58	(0,30)	(353.638.500,00)
Peralatan dan Mesin	377.099.341.764,80	349.822.593.577,61	7,80	27.276.748.187,19
Gedung dan Bangunan	1.139.238.295.676,28	1.068.642.727.700,29	6,61	70.595.567.975,99
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.181.449.638.509,63	2.725.712.792.219,90	16,72	455.736.846.289,73
Aset Tetap Lainnya	36.689.023.791,00	33.603.532.324,00	9,18	3.085.491.467,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.722.577.850,00	17.110.736.591,00	26,95	4.611.841.259,00
Akumulasi Penyusutan	(2.984.936.781.918,42)	(2.629.480.760.620,05)	13,52	(355.456.021.298,37)
Aset Tetap	1.887.960.047.315,87	1.682.463.211.935,33	12,21	205.496.835.380,54

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.887.960.047.315,87 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp205.496.835.380,54. Berdasarkan data Aset Tetap di atas, rincian mutasi aset pada masing-masing jenis aset tetap tersaji pada **Lampiran 9.1 s.d. 9.6**

5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.697.951.642,58 dan Rp117.051.590.142,58. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Tanah disajikan dalam tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Saldo awal Aset Tetap Tanah	117.051.590.142,58
Penambahan Aset Tetap Tanah:	818.529.071,00
Pengadaan Belanja Modal Tahun Berjalan	646.810.000,00
Mutasi antar OPD	53.958.571,00
Terima Hibah	117.760.500,00
Pengurangan Aset Tetap Tanah	1.172.167.571,00
Mutasi antar OPD	53.958.571,00
Pemberian Hibah Barang	471.399.000,00
Hutang Tahun sebelumnya	646.810.000,00
Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	116.697.951.642,58

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat penambahan Aset Tetap Tanah dengan rincian berikut ini.

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp646.810.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Terima hibah Aset Tetap Tanah dari masyarakat ke Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp117.760.500,00; dan
- 3) Mutasi Tanah dari BPPKAD ke BPBD sebesar Rp53.958.571,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah terjadi karena beberapa hal berikut ini :

- 1) Pemberian hibah tanah dibawah dermaga ke Direktorat Jenderal Perhubungan sebesar Rp471.399.000,00;
- 2) Pembayaran hutang Dinas Pekerjaan Umum atas Tanah di rumah makan mama nisa sebesar Rp646.810.000,00; dan
- 3) Mutasi Tanah dari BPPKAD ke BPBD sebesar Rp53.958.571,00.

Rincian nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	15.343.461.370,00	15.343.461.370,00
Dinas Kesehatan	2.567.963.242,25	2.567.963.242,25
Rumah Sakit Umum Daerah	434.199.250,00	434.199.250,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.946.996.083,33	65.946.996.083,33
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	117.760.500,00	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	24.024.000,00	24.024.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.958.571,00	
Dinas Sosial	49.227.750,00	49.227.750,00
Dinas Ketahanan Pangan	142.742.000,00	142.742.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	117.782.500,00	117.782.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.382.750,00	69.382.750,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55.317.800,00	55.317.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Perhubungan	688.900.550,00	688.900.550,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.910.900,00	10.910.900,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26.150.000,00	26150000
Dinas Perikanan	142.379.650,00	142.379.650,00
Dinas Pertanian	2.282.595.700,00	2.282.595.700,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	119.703.475,00	119.703.475,00
Sekretariat Daerah	8.653.110.830,00	9.124.509.830,00
Sekretariat DPRD	713.300.000,00	713.300.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	748.200.000,00	748.200.000,00
Kecamatan Jabiren Raya	75.000.000,00	75.000.000,00
Kecamatan Maliku	71.625.000,00	71.625.000,00
Kecamatan Pandih Batu	132.500.000,00	132.500.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	780.000.000,00	780.000.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	41.250.000,00	41.250.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	160.800.000,00	160.800.000,00
Kecamatan Banama Tingang	44.500.000,00	44.500.000,00
Inspektorat Daerah	28.600.000,00	28.600.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	476.085.000,00	476.085.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.579.524.721,00	16.633.483.292,00
Jumlah	116.697.951.642,58	117.051.590.142,58

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah berupaya mengamankan Aset Tetap serta memperkuat bukti kepemilikan sebagai dasar pencatatan dalam Neraca. Upaya sertifikasi tanah akan terus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan prioritas pembangunan di lingkungan Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga nilai saldo akhir Aset Tetap Tanah yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.697.951.642,58.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp300.000,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp377.099.341.764,80 dan Rp349.822.593.577,61. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut.

Saldo awal	349.822.593.577,61
Penambahan:	33.242.356.998,19
Belanja Modal Tahun Berjalan	28.676.649.006,19



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Reklasifikasi dari barang dan jasa	47.390.000,00
Mutasi antar SKPD	2.319.597.137,00
Terima Hibah dari pihak lain/Masyarakat	205.989.500,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.992.731.355,00
Pengurangan:	5.965.608.811,00
Ekstrakomtabel	367.497.914,00
Hibah barang	8.000.000,00
Mutasi antar SKPD	2.319.597.137,00
Penjualan Aset Tetap	2.884.600.500,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	367.047.700,00
Reklasifikasi antar belanja modal	18.865.560,00
Saldo Akhir	377.099.341.764,80

Sebagaimana tabel diatas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 berasal dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 terdapat pada SKPD berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.115.336.655,00
2	Dinas Kesehatan	7.445.210.099,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	6.761.912.595,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	937.668.368,75
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.856.800,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	20.100.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	274.470.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	496.285.900,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.048.128,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.120.600,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	108.387.600,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.503.027.638,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.050.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	60.958.183,00
15	Dinas Perhubungan	307.542.983,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	54.160.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	131.982.885,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	228.480.800,00
19	Dinas Perikanan	141.665.500,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23.942.000,00
21	Dinas Pertanian	265.830.414,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.204.000,00
23	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	2.477.055.451,44



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
24	Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	399.920.474,00
25	Kecamatan Kahayan Hilir	11.600.000,00
26	Kecamatan Jabiren Raya	73.730.000,00
27	Kecamatan Maluku	80.639.500,00
28	Kecamatan Pandih Batu	84.530.000,00
29	Kecamatan Kahayan Kuala	118.177.132,00
30	Kecamatan Sebangau Kuala	58.900.000,00
31	Kecamatan Kahayan Tengah	44.000.000,00
32	Kecamatan Banama Tingang	119.304.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	272.683.200,00
34	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	685.868.100,00
Jumlah		28.676.649.006,19

- 2) Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp47.390.000,00 terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	Keterangan	Jumlah (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Reklas dari Beban Barang dan Jasa berupa AC dan lemari arsip	20.650.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	reklas aset tetap dari beban barang dan jasa	11.175.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	Reklas dari Beban Pengadaan Perabot Kantor berupa kipas angin	15.565.000,00
Jumlah		47.390.000,00

- 3) Mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.319.597.137,00 terdapat pada SKPD berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	294.140.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	502.250.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.665.120,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31.680.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.840.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	366.292.457,00
Dinas Perhubungan	593.950.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	135.179.560,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	329.600.000,00
Jumlah	2.319.597.137,00

- 4) Terima hibah yang berasal dari instansi vertikal dan pihak swasta yang terdapat pada SKPD berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	Keterangan	Jumlah (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mencatat Hibah Aset Tetap Peralatan Komputer Kementerian Investasi sesuai BAST Nomor 269/XII/BAST/DPM/KEMENINVEST-BKM/2021	17.528.500,00
Kecamatan Kahayan Hilir	Terima Hibah dari Bank Pembangunan Kalteng	188.461.000,00
Jumlah		205.989.500,00

- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.992.731.355,00 terdapat pada SKPD berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	94.544.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	312.907.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.819.980,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.298.999.700,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86.460.675,00
Jumlah	1.992.731.355,00

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- 1) Ekstrakomtabel sebesar Rp367.497.914,00 terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	Ekstrakomtable (Rp)
Dinas Pendidikan	347.043.880,00
Dinas Kesehatan	9.721.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	6.046.170,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.686.864,00
Jumlah	367.497.914,00

- 2) Hibah sepeda motor pada SKPD Kecamatan Kahayan Tengah sebesar Rp8.000.000,00;
3) Mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.319.597.137,00 terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	Mutasi Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	502.250.000,00
Dinas Perhubungan	14.650.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.665.120,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.480.007.457,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	21.875.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	250.149.560,00
Jumlah	2.319.597.137,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- 4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena adanya penjualan kendaraan melalui lelang terbuka. Aset kendaraan yang dijual tersebut terdapat pada OPD berikut ini.

SKPD	Penjualan Aset (Rp)
Dinas Kesehatan	323.050.500,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	2.293.550.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	268.000.000,00
Jumlah	2.884.600.500,00

- 5) Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp367.047.700,00 terdapat pada SKPD berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	146.969.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah	201.255.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.933.000,00
Kecamatan Pandih Batu	10.890.000,00
Jumlah	367.047.700,00

- 6) Reklasifikasi antar Aset Tetap terdapat pada SOPD Sekretariat Daerah sebesar Rp18.865.560,00, yang merupakan reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa lukisan.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	66.565.073.751,00	61.502.640.976,00
Dinas Kesehatan	57.114.467.261,01	50.556.703.862,01
Rumah Sakit Umum Daerah	56.715.594.971,44	49.345.827.046,44
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.159.626.917,75	23.979.406.449,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.497.563.732,20	2.450.026.932,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.556.745.025,00	1.536.645.025,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.585.789.482,00	1.295.479.482,00
Dinas Sosial	2.217.626.401,67	2.217.626.401,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.921.353.041,00	10.038.124.684,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.126.992.237,33	934.944.109,33
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.496.961.859,00	4.364.841.259,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.903.215.830,00	3.794.828.230,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.775.338.424,00	3.977.997.950,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.276.940.393,20	4.261.890.393,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.354.333.574,00	2.293.375.391,00
Dinas Perhubungan	8.182.755.643,00	7.295.912.660,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2.591.315.561,00	2.537.155.561,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.684.093.030,00	3.585.246.765,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.859.825.975,00	1.631.345.175,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.236.789.230,00	2.236.789.230,00
Dinas Perikanan	7.423.602.811,00	7.281.937.311,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.132.184.028,00	1.108.242.028,00
Dinas Pertanian	18.250.110.833,00	17.984.280.419,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.836.232.575,00	3.818.028.575,00
Sekretariat Daerah	38.804.574.388,44	39.984.762.394,00
Sekretariat DPRD	12.654.956.405,00	11.925.435.931,00
Kecamatan Kahayan Hilir	1.783.905.979,00	1.583.844.979,00
Kecamatan Jabiren Raya	612.485.150,00	538.755.150,00
Kecamatan Maliku	791.584.527,78	710.945.027,78
Kecamatan Pandih Batu	578.116.801,00	504.476.801,00
Kecamatan Kahayan Kuala	831.704.828,00	702.352.696,00
Kecamatan Sebangau Kuala	570.949.700,00	512.049.700,00
Kecamatan Kahayan Tengah	723.255.725,00	671.690.725,00
Kecamatan Banama Tingang	457.575.000,00	338.271.000,00
Inspektorat Daerah	2.341.872.641,00	2.341.872.641,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5.129.409.688,00	4.878.601.488,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.224.954.844,98	12.970.775.629,98
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.129.463.500,00	2.129.463.500,00
Jumlah	377.099.341.764,80	349.822.593.577,61

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.139.238.295.676,28 dan Rp1.068.642.727.700,29. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut.

Saldo awal	1.068.642.727.700,29
Penambahan:	85.722.857.748,99
Belanja Modal Tahun Berjalan	73.112.943.643,72
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	6.488.163.564,27
Mutasi antar SKPD	5.259.927.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	565.950.000,00
Reklasifikasi dari KDP	295.873.541,00
Pengurangan:	15.127.289.773,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	1.564.174.200,00
Utang tahun 2021	562.645.000,00
Mutasi antar SKPD	5.259.927.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	4.466.464.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	488.670.655,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	2.237.451.918,00
Reklasifikasi ke KDP	547.957.000,00
Saldo Akhir	1.139.238.295.676,28



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Sebagaimana tabel di atas penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- 1) Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp73.112.943.643,72 yang terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	14.560.650.000,00
Dinas Kesehatan	6.647.286.620,00
Rumah Sakit Umum Daerah	27.398.690.053,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.534.865.480,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	409.433.200,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	799.569.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.599.099.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	159.694.000,00
Dinas Perhubungan	152.587.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.922.000,00
Dinas Perikanan	510.420.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	131.300.000,00
Dinas Pertanian	582.298.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	791.216.044,72
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.734.704.046,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	450.550.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.444.808.500,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	163.850.000,00
Jumlah	73.112.943.643,72

- 2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.488.163.564,27 terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	718.040.500,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.442.519.920,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.118.257.000,00
Dinas Sosial	165.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.899.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	39.750.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.490.000,00
Dinas Perhubungan	17.043.380,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	208.245.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pertanian	29.649.200,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	91.135.400,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	259.758.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	299.376.164,27
Jumlah	6.488.163.564,27

- 3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar SKPD sebesar Rp5.259.927.000,00 terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	323.962.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	648.555.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.650.000,00
Dinas Perhubungan	210.294.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	210.325.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	2.331.487.000,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	198.700.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	221.450.000,00
Kecamatan Pandih Batu	304.139.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	410.190.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	190.175.000,00
Jumlah	5.259.927.000,00

- 4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat pada SKPD berikut.

SKPD	2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	359.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	206.550.000,00
Jumlah	565.950.000,00

- 5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 295.873.541,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa terdapat pada SKPD berikut ini.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	40.790.000,00
Dinas Kesehatan	24.984.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.400.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.298.999.700,00
Jumlah	1.564.174.200,00

- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pembayaran utang TA 2021 sebesar Rp562.645.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya mutasi antar SKPD terdapat pada SKPD berikut ini.

SKPD	2022 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.421.197.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	190.175.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	648.555.000,00
Jumlah	5.259.927.000,00

- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.466.464.000,00 pada Dinas Pertanian;

SKPD	2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	1.411.017.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.890.642.000,00
Dinas Perikanan	164.805.000,00
Jumlah	4.466.464.000,00

- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Penangkal Petir pada Dinas Kesehatan sebesar Rp49.640.000,00, Papan Nama Rumah Sakit sebesar Rp152.750.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah, pengadaan *meubelair* stadion H.M Sanusi sebesar Rp199.819.980,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sekat ruangan dan Lemari Arsip sebesar Rp86.460.675,00 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.237.451.918,00 yang merupakan penimbunan halaman Rumah Sakit Umum Daerah;
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp 547.957.000,00 pada Dinas PUPR; dan Rincian nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	306.871.025.617,00	292.027.203.617,00
2	Dinas Kesehatan	141.426.176.386,46	134.135.473.766,46



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	89.072.742.731,01	61.673.351.676,01
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.756.982.735,48	295.981.092.694,48
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.116.675.000,00	3.910.125.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.321.715.200,00	1.217.261.459,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.217.261.459,00	1.912.282.000,00
8	Dinas Sosial	7.837.598.000,00	7.672.598.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.626.468.000,00	4.415.818.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.776.967.000,00	2.776.967.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.719.483.400,00	5.830.015.400,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.784.858.000,00	4.784.858.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.348.008.357,00	7.198.333.357,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.613.203.950,00	6.613.203.950,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.621.234.700,00	5.452.050.700,00
16	Dinas Perhubungan	12.493.485.830,00	12.113.561.450,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	917.606.501,00	917.606.501,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.559.670,00	4.998.637.670,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.966.138.000,00	1.787.018.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.797.590.000,00	5.797.590.000,00
21	Dinas Perikanan	13.555.593.714,00	13.209.978.714,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.643.495.804,00	2.483.070.804,00
23	Dinas Pertanian	26.390.515.756,70	25.778.568.556,70
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35.702.633.464,49	34.609.957.019,77
25	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	66.793.906.892,00	63.376.270.846,00
26	Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	15.549.604.010,00	2.552.856.080,00
27	Kecamatan Kahayan Hilir	3.938.281.500,00	15.890.188.599,00
28	Kecamatan Jabiren Raya	1.381.263.000,00	14.535.471.526,87
29	Kecamatan Maliku	1.981.060.000,00	4.436.551.250,00
30	Kecamatan Pandih Batu	2.268.961.500,00	14.877.304.010,00
31	Kecamatan Kahayan Kuala	2.003.817.000,00	3.716.831.500,00
32	Kecamatan Sebangau Kuala	1.343.417.200,00	1.381.263.000,00
33	Kecamatan Kahayan Tengah	1.354.393.000,00	1.981.060.000,00
34	Kecamatan Banama Tingang	2.342.047.853,00	1.964.822.500,00
35	Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	4.234.372.580,00	1.593.627.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*) Kabupaten Pulang Pisau Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.080.363.599,00	1.343.417.200,00
37	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.912.237.016,14	1.354.393.000,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.436.551.250,00	2.342.047.853,00
	Jumlah	1.139.238.295.676,28	1.068.642.727.700,29

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari nilai jalan dan jembatan, bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan instalasi pengamanan), dan jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.000.000,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.181.449.638.509,63 dan Rp2.725.712.792.219,90. Perhitungan tambah kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut.

Saldo awal	2.725.712.792.219,90
Penambahan:	459.797.757.289,73
Belanja Modal	117.448.436.859,73
Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa	7.693.547.600,00
Menerima Hibah	329.840.836.580,00
Utang tahun 2022	348.472.250,00
Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.466.464.000,00
Pengurangan:	4.060.911.000,00
Ekstrakomtabel	7.700.000,00
Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	589.400.000,00
Reklasifikasi ke Aset tetap Peralatan dan Mesin	149.850.000,00
Reklas Aset Tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	565.950.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	469.750.000,00
Reklasifikasi ke KDP	2.278.261.000,00
Saldo Akhir	3.181.449.638.509,63

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tersaji berikut ini:

- 1) Penambahan Aset Tetap yang berasal dari pengadaan Belanja Modal Tahun Berjalan yang terdapat pada SKPD berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	Belanja Modal (Rp)
Dinas Pendidikan	7.700.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	1.187.539.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.559.224.909,73
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.908.195.000,00
Dinas Perikanan	597.088.150,00
Dinas Pertanian	188.689.000,00
Jumlah	117.448.436.859,73

- 2) Penambahan Aset Tetap JIJ yang disebabkan karena adanya kapitalisasi dari beban barang dan jasa adalah sebesar Rp7.693.547.600,00 dan terdapat pada SKPD berikut ini.

SKPD	Jumlah (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	239.175.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.443.373.700,00
Dinas Pertanian	4.999.400,00
Dinas Pertanian	5.999.500,00
Jumlah	7.693.547.600,00

- 3) Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari adanya hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berikut ini adalah daftar barang yang dihibahkan.

SKPD	Jumlah (Rp)
Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 2	75.722.070.310,00
Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 3	72.466.474.350,00
Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 4	81.557.709.390,00
Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 5	57.865.737.210,00
Jembatan DIR Basarang Desa Tarung Manuah (Ruas STI-Tahai Jaya)	10.557.211.330,00
Jembatan DIR Tahai Desa Tahai Baru (Ruas Tahai Jaya-Tahai Baru)	10.557.211.330,00
Jembatan DIR Belanti I Desa Sanggang (Ruas Tahai Baru-Sanggang)	10.557.211.330,00
Jembatan DIR Belanti II (Ruas Belanti Siam-Gadabung)	10.557.211.330,00
Jumlah	329.840.836.580,00

- 4) Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari pengakuan utang TA 2022 atas pekerjaan pemasangan Penerangan Jalan Umum pada ruas jalan Pulang Pisau Gohong oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp348.472.250,00.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.466.464.000,00 terdapat pada SKPD.

SKPD	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	1.411.017.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.890.642.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	Jumlah
Dinas Perikanan	164.805.000,00
Jumlah	4.466.464.000,00

Penjelasan mengenai mutasi kurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tersaji berikut ini:

- 1) Pengurangan Aset Tetap yang disebabkan karena reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp7.700.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- 2) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa berupa Pemeliharaan pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp589.400.000,00 berupa pemeliharaan Jalan.
- 3) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp149.850.000,00 berupa alat kesehatan pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- 4) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena adanya reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp565.950.000,00 yang terdapat pada SKPD berikut ini;

SKPD	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah	359.400.000,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	206.550.000,00
Jumlah	565.950.000,00

- 5) Pengurangan Aset Tetap JIJ karena reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp469.750.000,00 berupa Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Komplek SPN Polda Kalteng di Kec. Kahayan Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) Pengurangan Aset Tetap JIJ sekaligus reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.278.261.000,00.

Rincian nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	5.507.595.344,00	5.507.595.344,00
Dinas Kesehatan	1.761.179.618,64	1.761.179.618,64
Rumah Sakit Umum Daerah	5.953.976.690,00	3.625.494.890,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.035.201.634.995,26	2.585.867.096.555,53
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17.848.873.150,00	14.736.628.150,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	406.515.000,00	406.515.000,00
Dinas Sosial	340.765.144,00	340.765.144,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.584.000,00	85.584.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.616.379.800,00	50.616.379.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	53.500.000,00	53.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	288.768.000,00	288.768.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	281.990.000,00	281.990.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	541.841.302,00	541.841.302,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	339.524.000,00	339.524.000,00
Dinas Perhubungan	1.613.587.250,00	1.613.587.250,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	273.994.300,00	273.994.300,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	214.312.000,00	214.312.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.215.000,00	52.215.000,00
Dinas Perikanan	3.780.585.798,41	3.018.692.648,41
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.695.188.000,00	1.695.188.000,00
Dinas Pertanian	45.604.958.300,32	45.405.270.400,32
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	892.094.660,00	892.094.660,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	5.442.830.692,00	5.442.830.692,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	432.855.700,00	432.855.700,00
Kecamatan Pandih Batu	32.400.000,00	32.400.000,00
Kecamatan Banama Tingang	32.400.000,00	32.400.000,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	891.662.000,00	891.662.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	888.367.800,00	888.367.800,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	209.059.965,00	209.059.965,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	165.000.000,00	165.000.000,00
Jumlah	3.181.449.638.509,63	2.725.712.792.219,90

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.689.023.791,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.603.532.324,00. Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya beserta penjelasan tersaji dalam tabel berikut.

Saldo awal	33.603.532.324,00
Penambahan:	3.113.351.467,00
Belanja Modal	359.833.989,00
Kapitalisasi Aset Tetap dari Beban Barang dan Jasa	27.450.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.237.451.918,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	469.750.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	18.865.560,00
Pengurangan:	27.860.000,00
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	27.860.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Saldo Akhir	36.689.023.791,00
--------------------	--------------------------

Perubahan Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2022 yang karena adanya penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.113.351.467,00 disebabkan oleh:

- 1) Penambahan Aset Tetap dari pengadaan Belanja Modal tahun berjalan sebesar Rp359.833.989,00 yang terdapat pada SKPD berikut.

Daftar SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	331.973.989,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.860.000,00
Jumlah	359.833.989,00

- 2) Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp27.450.000,00;
- 3) Penambahan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.237.451.918,00 berupa penimbunan halaman pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Penambahan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp469.750.000,00 berupa pekerjaan lanjutan peningkatan jalan SPN Polda Kalteng di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 5) Penambahan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Lukisan sebesar Rp18.865.560,00 pada SKPD Sekretariat Daerah.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan oleh:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Tak Berwujud berupa pengadaan e-Book pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp27.860.000,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

Daftar SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	23.078.067.177,00	22.746.093.188,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.628.323.978,00	2.390.872.060,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.921.973.000,00	6.424.773.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.147.600,00	9.147.600,00
Dinas Perhubungan	19.941.500,00	19.941.500,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	836.387.701,00	836.387.701,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	72.595.000,00	72.595.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Daftar SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pertanian	89.315.000,00	89.315.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	565.323.560,00	546.458.000,00
Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau	33.855.850,00	33.855.850,00
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	15.049.950,00	15.049.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49.986.475,00	49.986.475,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	369.057.000,00	369.057.000,00
Jumlah	36.689.023.791,00	33.603.532.324,00

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.722.577.850,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan KDP per 31 Desember 2021 yang nilainya sebesar Rp17.110.736.591,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Saldo awal	17.110.736.591,00
Penambahan:	4.907.714.800,00
Kapitalisasi Aset Tetap dari Beban Barang dan Jasa	1.259.801.800,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	547.957.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	1.783.956.000,00
Hutang tahun 2022	1.316.000.000,00
Pengurangan:	295.873.541,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	295.873.541,00
Saldo Akhir	21.722.577.850,00

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Penambahan Aset Tetap karena adanya kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.259.801.800,00 terdapat pada SKPD berikut ini.

Daftar SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.160.301.800,00
Dinas Perhubungan	99.500.000,00
Jumlah	1.259.801.800,00

2. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp547.957.000,00, yang terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian Pembangunan Gedung Kantor Dispora sebesar Rp398.250.000,00 dan pekerjaan Pembangunan Kantor BPD Desa Kanamit sebesar Rp149.707.000,00;
3. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.783.956.000,00 terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian berikut ini.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Daftar SKPD	Jumlah (Rp)
Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung Bawan – Goha	564.000.000,00
Perencanaan Teknis Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung Bawan – Goha	49.920.000,00
Pengawasan Teknis Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung Bawan – Goha	59.900.000,00
Pekerjaan Pemasangan PJU ruas Pulang Pisau-Gohong	1.110.136.000,00
Jumlah	1.783.956.000,00

4. Penambahan Aset Tetap Kosntruksi Dalam Pengerjaan berasal dari pengakuan Utang Tahun 2022 sebesar Rp1.316.000.000,00, merupakan utang pekerjaan Peningkatan Jalan Penghubung Bawan – Goha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan terjadi karena reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp295.873.541,00

Rincian nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	96.750.000,00	96.750.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.323.645.850,00	3.811.304.591,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	32.700.000,00	32.700.000,00
Dinas Sosial	39.850.000,00	39.850.000,00
Dinas Perhubungan	99.500.000,00	
Dinas Pemuda dan Olah Raga	12.743.132.000,00	12.743.132.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	88.000.000,00	88.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	299.000.000,00	299.000.000,00
Jumlah	21.722.577.850,00	17.110.736.591,00

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.984.936.781.918,42 sedangkan untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.629.480.760.620,05 Adapun rincian Akumulasi Aset Tetap per jenis tersaji berikut ini.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(295.586.079.248,06)	(271.424.115.906,07)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(493.142.708.737,00)	(424.885.675.709,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.196.207.993.933,36)	(1.933.170.969.004,98)
Jumlah	(2.984.936.781.918,42)	(2.629.480.760.620,05)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.1**;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.2**; dan
3. Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.3**.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas beberapa rekening. Berikut ini rincian rekening Aset Lainnya.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	76.477.700,00	91.477.700,00	(16,40)	(15.000.000,00)
Aset Tidak Berwujud	1.579.070.768,00	1.401.527.268,00	12,67	177.543.500,00
Aset Lain-lain	62.119.705.740,59	62.119.705.740,59	-	-
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(46.152.391.955,88)	(46.220.791.955,88)	(0,15)	68.400.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.093.725.868,03)	(841.443.501,34)	29,98	(252.282.366,69)
Treasury Deposit Facility (TDF)	51.280.527.086,00		-	51.280.527.086,00
Jumlah	67.809.663.470,68	16.550.475.251,37	309,71	51.259.188.219,31

5.3.1.4.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan TA 2022 adalah sebesar Rp76.477.700,00 berkurang sebesar Rp15.000.000,00 pada tahun 2022 karena adanya reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, sehingga saldo Tagihan Jangka Panjang lebih kecil bila dibandingkan dengan saldo tahun 2021 sebesar Rp91.477.700,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan kewajiban mantan Bendahara Dinas Pendidikan yang menghilangkan Kas Dinas Pendidikan yang kemudian oleh Tim TPTGR ditetapkan bahwa bendahara tersebut harus mengembalikan kas tersebut secara bertahap.

5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak berwujud Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.579.070.768,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	206.770.000,00
	Aplikasi E-Content	196.900.000,00
	Aplikasi SIGUNADI	9.870.000,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	419.504.343,00
	Web Server 2008 R264 Bit 2013	21.882.608,00
	OS Windows 7ultimate 2013	3.230.128,00
	Microsoft Office 2010	3.876.147,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
	Software Database (Oracle)	51.681.960,00
	Aplikasi SIMRAL	40.000.000,00
	Upgrade SISMIOB PBB	49.750.000,00
	Aplikasi eBPHTB	99.400.000,00
	Aplikasi SIMPATDA	149.683.500,00
3	Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu	531.214.325,00
	Software pelayanan perijinan	165.000.825,00
	Software pelayanan perijinan	240.923.500,00
	software tanda tangan elektronik	55.660.000,00
	Software pelayanan perijinan	69.630.000,00
4	Sekretariat Daerah	237.270.000,00
	Aplikasi E-Anjab	149.490.000,00
	Pulang Pisau Mobile / Pulang Pisau Dalam Genggaman	87.780.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.950.000,00
	Aplikasi Informasi Bursa Kerja On line	24.950.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.857.100,00
	Aplikasi E-Book	28.997.100,00
	Aplikasi E-Book	27.860.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.250.000,00
	Windows Server	14.250.000,00
8	Dinas Pertanian	19.855.000,00
	aplikasi SIMAKDAS Dinas Pertanian	19.855.000,00
9	Dinas Perikanan	68.400.000,00
	Paten Pembibitan Ikan	68.400.000,00
	Jumlah	1.579.070.768,00

Nilai amortisasi ini merupakan perhitungan manual dengan menggunakan *Microsoft excel* dan belum bisa diakomodir pada Aplikasi SIMDA BMD, sehingga menyebabkan terdapat selisih nilai amortisasi antara SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD sebesar nilai amortisasi Aset Tak Berwujud. Selain aplikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga memiliki Aset tak berwujud berupa hak paten pembenihan ikan di Dinas Perikanan sebesar Rp68.400.000,00. Amortisasi atas paten ini sebesar Rp68.400.000,00

5.3.1.4.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupa *software* pengadaan TA 2006 sampai dengan TA 2022. Beberapa diantaranya sudah melewati masa manfaat yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi sehingga nilai bukunya sudah nol. Berikut ini daftar aset tak berwujud.

No	SOPD	Aset Tak Berwujud (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2021 (Rp)	beban Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai Buku Aset Tak berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	206.770.000,00	203.480.000,00	3.290.000,00	206.770.000,00	-
	Aplikasi E-Content	196.900.000,00	196.900.000,00		196.900.000,00	0,00
	Aplikasi SIGUNADI	9.870.000,00	6.580.000,00	3.290.000,00	9.870.000,00	0,00
2	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	419.504.343,00	170.420.843,00	66.266.666,66	236.687.509,66	182.816.833,32



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	SOPD	Aset Tak Berwujud (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2021 (Rp)	beban Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai Buku Aset Tak berwujud (Rp)
	Web Server 2008 R264 Bit 2013	21.882.608,00	21.882.608,00		21.882.608,00	0,00
	OS Windows 7ultimate 2013	3.230.128,00	3.230.128,00		3.230.128,00	0,00
	Microsoft Office 2010	3.876.147,00	3.876.147,00		3.876.147,00	0,00
	Software Database (Oracle)	51.681.960,00	51.681.960,00		51.681.960,00	0,00
	Aplikasi SIMRAL	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00
	Upgrade SISMIOP PBB	49.750.000,00	49.750.000,00		49.750.000,00	0,00
	Aplikasi eBPHTB	99.400.000,00	-	66.266.666,66	66.266.666,66	33.133.333,32
	Aplikasi SIMPATDA	149.683.500,00				149.683.500,00
3	Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu	531.214.325,00	447.687.658,34	41.763.333,34	489.450.991,68	41.763.333,33
	Software pelayanan perijinan	165.000.825,00	165.000.825,00	-	165.000.825,00	0,00
	Software pelayanan perijinan	240.923.500,00	240.923.500,00	-	240.923.500,00	0,00
	software tanda tangan elektronik	55.660.000,00	18.553.333,34	18.553.333,34	37.106.666,68	18.553.333,33
	Software pelayanan perijinan	69.630.000,00	23.210.000,00	23.210.000,00	46.420.000,00	23.210.000,00
4	Sekretariat Daerah	237.270.000,00	0,00	79.090.000,00	79.090.000,00	158.180.000,00
	Aplikasi E-Anjab	149.490.000,00	-	49.830.000,00	49.830.000,00	99.660.000,00
	Pulang Pisau Mobile / Pulang Pisau Dalam Genggaman	87.780.000,00	-			87.780.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	24.950.000,00	0,00	8.316.666,67	8.316.666,67	16.633.333,33
	Aplikasi Informasi Bursa Kerja On line	24.950.000,00	-	8.316.666,67	8.316.666,67	16.633.333,33
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.857.100,00	0,00	9.665.700,00	9.665.700,00	47.191.400,00
	Aplikasi E-Book	28.997.100,00	-	9.665.700,00	9.665.700,00	19.331.400,00
	Aplikasi E-Book 2022	27.860.000,00				27.860.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.250.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00
	Windows Server	14.250.000,00	-	4.750.000,00	4.750.000,00	9.500.000,00
8	Dinas Pertanian	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	19.855.000,00	0,00
	aplikasi SIMAKDAS Dinas Pertanian	19.855.000,00	19.855.000,00	-	19.855.000,00	0,00
9	Dinas Perikanan	68.400.000,00	68.400.000,00		68.400.000,00	
	Hak Paten	68.400.000,00	68.400.000,00		68.400.000,00	
	Total	1.579.070.768,00	909.843.501,34	183.882.366,69	1.093.725.868,03	485.344.899,98

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 mempunyai saldo sebesar Rp15.967.313.784,71 dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Aset Lain-lain	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Rusak Berat	61.222.335.940,59	61.222.335.940,59
2	Barang Jasa yang direklas ke Aset Lain-lain	639.681.000,00	639.681.000,00
3	Piutang yang akan dihapuskan	257.688.800,00	257.688.800,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(46.152.391.955,88)	(46.152.391.955,88)
Jumlah		15.967.313.784,71	15.967.313.784,71

Aset Lain-Lain tersebut dalam Neraca per 31 Desember TA 2022 disajikan sebesar nilai buku. Nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp62.119.705.740,59 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp46.152.391.955,88 sehingga nilai buku Aset Lain-Lain di Neraca sebesar Rp15.967.313.784,71, rincian perhitungan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.4.5. *Treasury Deposit Facility (TDF)*

Berdasarkan pada surat dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Nomor S-392/WPB-18/2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah dibukakan deposito dengan nomor 519.000.441.980 dengan nilai deposito sebesar Rp51.280.527.086,00 dengan masa holding periode selama 3 bulan, dan setelah itu diperbolehkan untuk dicairkan ke RKUD dengan persyaratan tertentu. Adapun rekening deposito itu merupakan milik Kementerian Keuangan, namun secara dana yang tersimpan adalah milik pemerintah daerah.

5.3.2. **Kewajiban**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Kewajiban	10.049.069.017,24	21.411.655.657,50	(53,07)	(11.362.586.640,26)
Jumlah	10.049.069.017,24	21.411.655.657,50	(53,07)	(11.362.586.640,26)

Saldo Kewajiban (Utang) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.049.069.017,24 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.411.655.657,50. Saldo Utang Kabupaten Pulang Pisau merupakan Utang Jangka Pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Kabupaten Pulang Pisau tersaji sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	74.914.847,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.335.025,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.200.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.820.000,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	182.175.000,00
Utang Belanja Barang	21.927.840,00
Utang Belanja Jasa	1.335.216.456,00
Utang Belanja Pemeliharaan	67.560.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.042.579.587,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	485.000.000,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	2.812.970.263,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.369.998,74
Jumlah	10.049.069.017,24

5.3.2.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah utang pajak sebesar Rp74.914.847,00 yang belum disetor pada sekolah berikut ini.

No	Sekolah	Nilai Pajak
1	SDN GARUNG - 1	115.449,00
2	SDN ANJIR PULANG PISAU - 1	470.000,00
3	SDN MANTAREN - 1	193.828,00
4	SDN PULANG PISAU - 2	3.794.010,00
5	SDN PULANG PISAU - 7	2.146.038,00
6	SMPN - 2 KAHAYAN HILIR	4.863.882,00
7	SMPN - 4 KAHAYAN HILIR	6.643.501,00
8	SDN MANGGURUH	15.000,00
9	SDN BERENG RAMBANG - 1	2.690.486,00
10	SMPN - 1 KAHAYAN TENGAH	8.326.586,00
11	SDN MALIKU BARU - 4	1.850.150,00
12	SDN SEI BARU TEWU - 1	65.946,00
13	SDN TAHAI JAYA - 1	1.165.950,00
14	SDN PADURAN MULYA - 1	139.443,00
15	SDN LAWANG URU - 1	11.013.073,00
16	SDN LAWANG URU - 2	3.195.091,00
17	SDN PAPUYU PUDAK	308.065,00
18	SDN BUKIT LITI - 1	4.155.542,00
19	SDN PETUK LITI - 1	1.575.398,00
20	SMPN - 2 KAHAYAN TENGAH	11.930.705,00
21	SDN GANDANG - 3	1.229.160,00
22	SDN KANAMIT - 3	33.311,00
23	SDN DANDANG - 1	4.735.022,00
24	SDN DANDANG - 4	372.654,00
25	SDN MEKAR JAYA	1.329.253,00
26	SDN PADURAN SEBANGAU - 2	661.837,00
27	SDN SEBANGAU PERMAI - 1	1.895.467,00
TOTAL		74.914.847,00

5.3.2.2. Utang Beban

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Utang Beban	7.149.813.908,00	18.318.267.449,00	(60,97)	(11.168.453.541,00)
Jumlah	7.149.813.908,00	18.318.267.449,00	(60,97)	(11.168.453.541,00)

Berikut rincian Utang Beban.

Uraian	Jumlah (Rp)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.335.025,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.200.000,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.820.000,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	182.175.000,00
Utang Belanja Barang	21.927.840,00
Utang Belanja Jasa	1.335.216.456,00
Utang Belanja Pemeliharaan	67.560.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	5.042.579.587,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi	485.000.000,00
Jumlah	7.149.813.908,00

5.3.2.2.1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp2.335.025,00 merupakan Utang Belanja kekurangan pembayaran Gaji ASN yang terdapat pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.3.2.2.2. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.200.000,00 adalah Utang Tambahan Penghasilan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terbayar di tahun 2022.

5.3.2.2.3. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan Utang Pengelolaan Keuangan yang belum terbayar pada tahun 2022 sebesar Rp10.820.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan.

5.3.2.2.4. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp182.175.000,00 adalah kekurangan pembayaran pegawai honorer bulan Desember pada RSUD Kabupaten Pulang Pisau.

5.3.2.2.5. Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebesar Rp21.927.840,00 merupakan utang Pembangunan Pastori Gereja GKE Tanjung Sanggalang yang terdapat pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.2.2.6. Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp1.335.216.456,00 yang terdapat pada SKPD berikut ini.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	923.793.255,00
Rumah Sakit Umum Daerah	336.235.717,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.950.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	508.950,00
Dinas Sosial	35.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.084.150,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.831.900,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	408.750,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.962.950,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.338.586,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	47.800,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.883.650,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.150,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	397.950,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.278.160,00
Dinas Pertanian	7.274.860,00
Sekretariat DPRD	2.668.990,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	403.450,00
Inspektorat	10.882.588,00
Kecamatan Kahayan Hilir	1.080.400,00
Jumlah	1.335.216.456,00

5.3.2.2.7. Utang Belanja Pemeliharaan

Utang belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Utang pada Dinas Lingkungan Hidup atas pemeliharaan *Solar Cell* sebesar Rp67.560.000,00.

5.3.2.2.8. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD adalah sebesar Rp5.042.579.587,00 yang terdiri dari.

Uraian	Jumlah (Rp)
Biaya Bahan dan Perlengkapan Makan Minum Pasien	73.386.666,00
Biaya Makanan, Minuman Rapat dan Kegiatan	7.777.000,00
Belanja Pengisian Tabung Oksigen	24.350.000,00
Biaya Gas Dapur	1.925.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Tamu	3.432.000,00
Biaya Jasa Pelayanan Pasien Umum	124.525.076,00
Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas Ambulance	16.450.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak / Gas Kendaraan Dinas / Operasional	10.850.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Biaya BHP Farmasi	128.694.503,00
Biaya Bahan dan Obat-obatan	189.804.049,00
Biaya Jasa Pihak Ketiga/Tim Independen dll	4.250.000,00
Biaya Cetak	29.213.088,00
Biaya Penggandaan (Fotocopy)	17.346.081,00
Biaya Jasa Pelayanan BPJS, Jampersal, KB dan Covid-19	4.347.778.824,00
BIAYA LAIN-LAIN	9.400.000,00
BIAYA AIR	7.004.000,00
BIAYA LISTRIK	46.393.300,00
Jumlah	5.042.579.587,00

5.3.2.2.9. Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi

Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau merupakan Utang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna pembayaran Transponder TVRI sebesar Rp245.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Pemeliharaan TMII sebesar Rp240.000.000,00.

5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.369.998,74	0,00	100,00	11.369.998,74
Utang Pengadaan Aset Tetap	Rp2.812.970.263,50	3.086.898.013,50	8,87	273.927.450,00
Jumlah				

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang yang muncul karena adanya surat dari Asuransi Askrido dengan Nomor 0019/PLR/B/I/2022 perihal permohonan untuk mengembalikan klaim asuransi atas nama CV.Citra Utama Perkasa yang ditransfer dua kali ke RKUD pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp11.369.998,74.

Utang Pengadaan Aset Tetap

Utang Pengadaan Aset Tetap TA 2022 sebesar Rp2.812.970.263,50 Utang Pengadaan Aset tetap tersebut merupakan utang kontrak kepada pihak ketiga adapun skema mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya tersaji sebagai berikut.

SKPD	Utang Tahun 2021 (Rp)	Pembayaran utang (Rp)	penambahan utang (Rp)	Utang Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	17.746.500,00	0,00	0	17.746.500,00
Dinas Kesehatan	15.796.895,00	0,00	0,00	15.796.895,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.881.281.350,50	1.981.277.840,00	1.707.350.090,00	2.607.353.600,50



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	Utang Tahun 2021 (Rp)	Pembayaran utang (Rp)	penambahan utang (Rp)	Utang Tahun 2022 (Rp)
Dinas Perhubungan	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
Dinas Pertanian	36.890.318,00	0,00	0,00	36.890.318,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45.358.000,00	0,00	0,00	45.358.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	23.817.750,00	0,00	0,00	23.817.750,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	63.517.200,00	0,00	0,00	63.517.200,00
Jumlah	3.086.898.013,50	1.981.277.840,00	1.707.350.090,00	2.812.970.263,50

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang yang muncul karena adanya surat dari Asuransi Askindo dengan Nomor 0019/PLR/B/I/2022 perihal permohonan untuk mengembalikan klaim asuransi atas nama CV.Citra Utama Perkasa yang ditransfer dua kali ke RKUD pada tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp11.369.998,74.

5.3.3. Ekuitas

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Ekuitas	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27
Jumlah	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27

Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten TA 2022 sebesar Rp2.311.445.762.335,56 sedangkan Ekuitas TA 2021 yang nilainya sebesar Rp2.121.993.677.698,28.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan	1.293.738.743.739,96	1.100.775.600.366,60	17,53	192.963.143.373,36
Beban	1.069.134.858.171,82	1.018.913.820.703,02	4,93	50.221.037.468,80
Surplus Defisit dari kegiatan Non Operasional	(2.834.980.893,12)	(5.924.367.902,99)	(52,15)	3.089.387.009,87
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	(657.172.500,00)	(2.246.133.344,00)	(70,74)	1.588.960.844,00
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	221.111.732.175,02	73.691.278.416,59	336,35	247.862.528.696,03

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan-LO	1.293.738.743.739,96	1.100.775.600.366,60	16,45	192.963.143.373,36
Jumlah	1.293.738.743.739,96	1.100.775.600.366,60	16,45	192.963.143.373,36

Rincian Pendapatan - LO TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	48.862.083.390,30	295.384.522.181,42
Pendapatan Transfer-LO	914.712.073.769,66	782.000.728.445,18
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	330.164.586.580,00	23.390.349.740,00
Jumlah	1.293.738.743.739,96	1.100.775.600.366,60

Penjelasan masing-masing akun Pendapatan LO TA 2022 adalah sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	48.862.083.390,30	295.384.522.181,42	(83,46)	(246.522.438.791,12)
Jumlah	48.862.083.390,30	295.384.522.181,42	(83,46)	(246.522.438.791,12)

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pajak Daerah-LO	10.435.559.283,10	217.049.784.341,00
Retribusi Daerah-LO	2.798.277.761,00	2.135.879.165,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.017.720.761,00	7.370.086.337,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	28.610.525.585,20	68.828.772.338,42
Jumlah	48.862.083.390,30	295.384.522.181,42

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2022 dan 2021 terdapat pada SKPD sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.743.990.600,00	4.894.044.170,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	19.467.301.680,00	60.585.730.526,85
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.000.000,00	81.450.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000,00	11.000.000,00
6	Dinas Perhubungan	929.853.500,00	682.138.050,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	607.607.168,00	-
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	158.997.454,27	385.050.654,20
8	Dinas Perikanan	1.200.000,00	5.845.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
9	Dinas Pertanian	6.375.000,00	6.400.000,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70.744.000,00	72.253.000,00
11	Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	164.100.000,00	132.010.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	60.000.000,00	43.500.000,00
13	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.503.363.188,03	228.307.963.863,19
14	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		82.033.502,18
15	Sekretariat DPRD	20.100.000,00	1.800.000,00
16	Kecamatan Kahayan Hilir	36.383.000,00	21.179.000,00
17	Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	2.400.000,00
18	Kecamatan Maluku	14.922.800,00	13.144.515,00
19	Kecamatan Pandih Batu	7.200.000,00	7.250.000,00
20	Kecamatan Kahayan Kuala	16.220.000,00	15.062.000,00
21	Kecamatan Sebangau Kuala	1.600.000,00	1.050.000,00
22	Kecamatan Kahayan Tengah	875.000,00	27.217.900,00
23	Kecamatan Banama Tingang	7.750.000,00	-
Jumlah		48.862.083.390,30	295.384.522.181,42

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp10.435.559.283,10 dan sebesar Rp217.049.784.341,00, menurun sebesar Rp206.614.225.057,90, sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pajak Daerah-LO	10.435.559.283,10	217.049.784.341,00
Jumlah	10.435.559.283,10	217.049.784.341,00

Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO pada TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	2.400.000,00	2.100.000,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	31.905.930,00	30.007.109,00
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	38.602.000,00	34.310.000,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.011.537.130,90	953.338.992,20
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	800.000,00	1.000.000,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	-	1.887.000,00
Pertandingan Olahraga - LO	-	-
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	26.855.510,00	14.915.860,00
Pajak Reklame Kain-LO	15.603.000,00	32.807.000,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	3.852.384.124,00	3.184.852.618,00
Pajak Sarang Burung Walet-LO	53.680.500,00	44.954.317,00
Pajak Granit/Andesit-LO	470.957.402,20	358.352.453,80
Pajak Pasir dan Kerikil-LO	2.188.047.710,00	2.758.694.112,00
Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	44.876.410,00	33.584.522,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
PBBP2-LO	1.570.887.902,00	1.522.561.401,00
BPHTB-Pemindahan Hak-LO	816.845.720,00	867.800.949,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	310.175.944,00	207.208.618.007,00
Jumlah	10.435.559.283,10	217.049.784.341,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.798.277.761,00 dan Rp2.135.879.165,00, meningkat sebesar Rp662.398.596,00. Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Retribusi Daerah-LO	2.798.277.761,00	2.135.879.165,00
Jumlah	2.798.277.761,00	2.135.879.165,00

Rincian Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan 2021 masing-masing sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO		
Dinas Kesehatan	531.743.900,00	486.262.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.480.000,00	42.120.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		
Dinas Perhubungan	48.902.000,00	24.000.000,00
Retribusi Pelataran-LO		
Kecamatan Kahayan Hilir	10.208.000,00	2.714.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	7.200.000,00	2.800.000,00
Retribusi Los-LO		
Kecamatan Kahayan Hilir	23.175.000,00	15.465.000,00
Kecamatan Maliku	6.830.000,00	4.176.000,00
Kecamatan Pandih Batu	5.200.000,00	5.250.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	6.720.000,00	7.680.000,00
Kecamatan Banama Tingang	7.000.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO		
Kecamatan Kahayan Kuala	-	-
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO		
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	61.744.000,00	67.753.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO		
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	557.607.168,00	-
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO		
Dinas Kesehatan	44.712.000,00	38.814.500,00
Dinas Perikanan	-	2.200.000,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	163.200.000,00	202.770.000,00
Sekretariat DPRD	20.100.000,00	-
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO		
Dinas Pendidikan	6.000.000,00	6.000.000,00
Dinas Kesehatan	3.000.000,00	4.500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000,00	9.000.000,00
Dinas Perikanan	-	2.250.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.000.000,00	4.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	53.900.000,00	31.850.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	60.000.000,00	43.500.000,00
Kecamatan Kahayan Hilir	3.000.000,00	3.000.000,00
Kecamatan Jabiren Raya	3.500.000,00	2.400.000,00
Kecamatan Maliku	3.600.000,00	1.925.000,00
Kecamatan Pandih Batu	2.000.000,00	2.000.000,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.050.000,00	3.900.000,00
Kecamatan Sebangau Kuala	1.600.000,00	1.050.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah	875.000,00	-
Kecamatan Banama Tingang	750.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.000.000,00	81.450.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO		
Dinas Lingkungan Hidup	-	2.000.000,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	110.200.000,00	100.160.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO		
Dinas Lingkungan Hidup	-	6.400.000,00
Dinas Pertanian	6.375.000,00	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO		
Dinas Perhubungan	93.507.500,00	47.705.550,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO		
Sekretariat DPRD	-	1.800.000,00
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO		
Dinas Perhubungan	750.750.000,00	596.790.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO		
Dinas Perikanan	1.200.000,00	1.395.000,00
Dinas Pertanian	-	-
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO		
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	68.711.393,00	-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		231.712.400,00
Kecamatan Maliku		7.043.515,00
Kecamatan Kahayan Kuala		682.000,00
Kecamatan Kahayan Tengah		27.217.900,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO		
Dinas Perhubungan	36.694.000,00	13.642.500,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi-LO		
Kecamatan Maliku	4.492.800,00	-
Kecamatan Kahayan Kuala	1.250.000,00	-
Jumlah	2.798.277.761,00	2.135.879.165,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 dan 2021 sebesar Rp7.017.720.761,00 dan Rp7.370.086.337,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Deviden Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	7.017.720.761,00	7.352.909.145,00
Jamkrida	-	17.177.192,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah	7.017.720.761,00	7.370.086.337,00

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO TA 2022 adalah sebesar Rp28.610.525.585,20 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp68.828.772.338,42. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah menurun sebesar Rp40.218.246.753,22 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	28.610.525.585,20	68.828.772.338,42
Jumlah	28.610.525.585,20	68.828.772.338,42

Rincian Lain-lain PAD yang Sah LO diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Hasil Sewa BMD- LO	50.000.000,00	-
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.423.218.263,05	2.077.603.918,60
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	6.080.625,60	160.890.700,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	15.658.168,93	41.693.326,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	860.614.022,87	776.384.949,84
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	314.676.325,00	64.007.542,75
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	32.000,00	36.000,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	38.000,00	10.000,00
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	201.500,00	76.300,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO		4.000,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO		7.890,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	56.344.994,00	74.345.861,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO		700.800,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	61.200,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	110.517.454,27	110.517.454,20
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	933.026.625,00	465.854.880,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO	207.820.026,48	11.360.517,00
Pendapatan dari BLUD-LO	19.467.301.680,00	60.540.367.363,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.164.534.700,00	4.364.466.870,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO		12.400.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	400.000,00	128.043.966,03
Pendapatan dari Pengembalian LHP-LO		-
Jumlah	28.610.525.585,20	68.828.772.338,42



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp914.712.073.769,66 lebih tinggi Rp132.711.345.324,48 jika dibandingkan dengan pendapatan 31 Desember 2021 sebesar Rp782.000.728.445,18.

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Transfer-LO	914.712.073.769,66	782.000.728.445,18	16,97	132.711.345.324,48
Jumlah	914.712.073.769,66	782.000.728.445,18	16,97	132.711.345.324,48

Pendapatan Transfer-LO terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	842.548.862.821,00	716.095.211.021,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	26.803.680.000,00	33.207.666.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	45.359.530.948,66	32.697.851.424,18
Jumlah	914.712.073.769,66	782.000.728.445,18

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO adalah sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	144.026.598.063,00	69.363.964.375,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	70.691.444.988,00	18.234.181.854,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.732.636.148,00	4.657.911.189,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		83.253.036,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.422.671.000,00	8.837.392.028,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	204.030.000,00	113.037.009,00
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.369.491.424,00
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Landrent-LO	4.240.280,00	
Bagi Hasil Dari Royalti Mineral dan Batubara	61.013.264.647,00	36.068.697.835,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	515.284.162.032,00	515.062.491.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	515.284.162.032,00	515.062.491.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.772.954.708,00	50.900.102.470,00
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO		2.096.065.000,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi Reguler-LO	4.012.416.000,00	
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	4.956.592.750,00	1.032.234.500,00
DAK Bidang Pertanian - LO	7.284.020.200,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	2.062.965.000,00	1.104.402.550,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	10.913.934.864,00	4.816.465.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.189.691.939,00	6.179.165.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO		285.117.250,00
DAK Penugasan Bidang Irigasi	7.838.830.000,00	14.441.166.600,00
DAK Reguler Bidang Jalan – LO	10.503.800.000,00	7.870.789.250,00
DAK Penugasan Bidang Jalan-LO	11.654.300.000,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO		1.974.210.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO		6.002.448.154,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.462.763.494,00	676.985.656,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB-LO	15.896.846.754,00	808.279.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Peningkatan dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	131.542.800,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	4.304.797.032,00	
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO		3.612.774.310,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	5.736.799.000,00	
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Penurunan Stunting – LO	653.545.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	574.297.175,00	
DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-LO	2.595.812.700,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	86.465.148.018,00	80.768.653.176,00
DAK BOS Reguler-LO	17.813.906.693,00	
DAK Tunjangan Profesi Gusu PNS Daerah (TPG PNSD) - LO	45.726.670.420,00	55.823.153.000,00
DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD) - LO	980.250.000,00	1.025.500.000,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) - LO	225.700.000,00	2.277.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	14.602.470.755,00	16.382.057.936,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	400.800.000,00	
DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) - LO	2.017.355.800,00	1.471.010.040,00
DAK Tunjangan Khusus Guru	3.677.994.300,00	2.239.818.600,00
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan		895.040.600,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	451.800.000,00	-
DAK Pelayanan Kepariwisata		97.600.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	191.632.050,00	335.173.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	376.568.000,00	222.000.000,00
Jumlah	842.548.862.821,00	716.095.211.021,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO berupa Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
DID-LO	26.803.680.000,00	33.207.666.000,00
Transfer Dana Desa LO		-
Jumlah	26.803.680.000,00	33.207.666.000,00

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Pemerintah Provinsi)-LO sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	4.562.344.433,80	16.722.538.126,26
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.298.066.713,57	4.937.170.117,80
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	27.133.325.528,11	3.836.889.911,52
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	58.318.210,18	10.031.315,60
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.307.476.063,00	7.191.221.953,00
Jumlah	45.359.530.948,66	32.697.851.424,18

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp330.164.586.580,00 lebih tinggi Rp306.774.236.840,00 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.390.349.740,00.

Uraian	2022	2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	330.164.586.580,00	23.390.349.740,00	1.312	306.774.236.840,00
Jumlah	330.164.586.580,00	23.390.349.740,00	1.312	306.774.236.840,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Rincian Pendapatan Hibah – LO sebagai berikut.

Uraian	2022	2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	17.528.500,00	0	-	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	329.840.836.580,00	2.743.601.205,00	11.922,19	327.097.235.375,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	117.760.500,00	42.320.000,00	178,26	75.440.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022	2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	188.461.000,00	0	100,00	188.461.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0	51.538.500,00	100,00	(51.538.500,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0	20.552.890.035,00	100,00	(20.552.890.035,00)
Jumlah	330.164.586.580,00	23.390.349.740,00	1.311,54	306.756.708.340,00

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO

Pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat LO sebesar Rp17.528.500,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Hibah Aset Tetap Peralatan Komputer Kementerian Investasi	17.528.500,00
Jumlah		17.528.500,00

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO

Pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah LO sebesar Rp329.840.836.580,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 2	75.722.070.310,00
2	Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 3	72.466.474.350,00
3	Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 4	81.557.709.390,00
4	Jalan Kawasan Food Estate Belanti Kab. Pulang Pisau 5	57.865.737.210,00
5	Jembatan DIR Basarang Desa Tarung Manuah (Ruas STI-Tahai Jaya)	10.557.211.330,00
6	Jembatan DIR Tahai Desa Tahai Baru (Ruas Tahai Jaya-Tahai Baru)	10.557.211.330,00
7	Jembatan DIR Belanti I Desa Sanggang (Ruas Tahai Baru-Sanggang)	10.557.211.330,00
8	Jembatan DIR Belanti II (Ruas Belanti Siam-Gadabung)	10.557.211.330,00
Jumlah		329.840.836.580,00

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri – LO sebesar Rp117.760.500,00 merupakan hibah dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Hibah tanah ke Dinas Perkim untuk jalan lingkungan beserta fasum dan fasos	117.760.500,00
Jumlah		117.760.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis -LO sebesar Rp188.461.000,00 merupakan sumbangan dari Bank Kalteng berupa.

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Alat Angkutan	188.461.000,00
Jumlah		188.461.000,00

5.4.2. Beban

Beban merupakan beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2022. Beban LO terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Beban LO Tahun 2022 lebih besar Rp50.221.037.468,80 dibandingkan dengan TA 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022	2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Beban	1.069.134.858.171,82	1.018.913.820.703,02	4,93	50.221.037.468,80
Jumlah	1.069.134.858.171,82	1.018.913.820.703,02	4,93	50.221.037.468,80

Rincian Beban TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Pegawai	332.356.343.026,00	368.489.724.445,28
Beban Persediaan	99.635.084.113,73	73.628.153.409,83
Beban Jasa	101.331.602.096,48	60.647.914.664,35
Beban Pemeliharaan	38.128.758.917,73	23.479.942.420,00
Beban Perjalanan Dinas	57.253.386.121,00	52.343.305.122,00
Beban Hibah	13.291.266.799,00	22.901.656.564,00
Beban Bantuan Sosial	415.940.000,00	572.200.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	358.508.333.997,06	356.224.143.629,63
Beban Penyisihan Piutang	6.434.792.300,82	2.249.079.647,93
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	638.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	3.420.738.400,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	57.720.612.400,00	57.739.700.800,00
Jumlah	1.069.134.858.171,82	1.018.913.820.703,02

5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp332.356.343.026,00 sedangkan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp368.489.724.445,28. Beban Pegawai terdiri atas rincian obyek dapat dilihat pada **Lampiran 12**.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2022 sebesar Rp99.635.084.113,73 dan TA 2021 sebesar Rp73.628.153.409,83. Adapun rincian dari Beban Persediaan LO dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa TA 2022 sebesar Rp101.331.602.096,48 dan TA 2021 yang nilainya sebesar Rp60.647.914.664,35. Beban jasa terdiri atas rincian obyek dapat dilihat di **Lampiran 14**.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.128.758.917,73 sedangkan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.479.942.420,00. Beban pemeliharaan LO terdiri atas rincian obyek berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	465.424.000,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.037.867.717,00	5.356.741.850,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.945.787.405,73	3.976.265.570,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.679.679.795,00	14.106.937.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		39.998.000,00
Jumlah	38.128.758.917,73	23.479.942.420,00

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.253.386.121,00 sedangkan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.343.305.122,00. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas rincian obyek berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	55.837.404.621,00	51.168.890.272,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	39.486.900,00	10.904.300,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	834.499.100,00	1.125.579.050,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	526.420.000,00	37.931.500,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.575.500,00	-
Jumlah	57.253.386.121,00	52.343.305.122,00

5.4.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.291.266.799,00 sedangkan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.901.656.564,00. Beban Hibah terdiri atas rincian obyek sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	471.399.000,00	9.700.000,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.000.000,00	245.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.597.500.770,00	21.655.699.535,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	295.000.000,00	162.500.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	400.000.000,00	299.390.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	10.000.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	519.367.029,00	519.367.029,00
Jumlah	13.291.266.799,00	22.901.656.564,00

5.4.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 adalah Bantuan Langsung Tunai untuk pelaku usaha transportasi penyebrangan sungai yang terdampak inflasi kenaikan BBM serta Bantuan Sosial Individu yang diserahkan kepada mahasiswa S2 sedangkan Tahun 2021 adalah Bantuan Sosial Tunai untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	415.940.000,00	572.200.000,00
Jumlah	415.940.000,00	572.200.000,00

5.4.2.8. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penambahan Penyisihan Piutang selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	12.000.000,00	3.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	282.518.895,82	11.051.745,43
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.140.273.405,00	2.193.230.302,50
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		41.797.600,00
Jumlah	6.434.792.300,82	2.249.079.647,93

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.049.773.841,99	26.733.291.719,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68.237.652.860,00	66.519.523.907,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	263.037.024.928,38	262.816.050.170,05
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	183.882.366,69	155.277.833,34
Jumlah	358.508.333.997,06	356.224.143.629,63



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.4.2.9.1. Beban Penyusutan

Beban penyusutan pada tahun anggaran 2022 dan 2021 pada Aset Tetap sebesar Rp358.324.451.630,27 dan Rp356.068.865.796,29. Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.049.773.841,99	26.733.291.719,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	68.237.652.860,00	66.519.523.907,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	263.037.024.928,38	262.816.050.170,05
Jumlah	358.324.451.630,37	356.068.865.796,29

Untuk rincian Beban Penyusutan TA 2022 berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.4.2.9.2. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud terdapat pada Tujuh SKPD, dengan total nilai amortisasi adalah sebesar Rp183.882.366,69. Rincian nilai Amortisasi Aset Tak berwujud pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	3.290.000,00	3.290.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	4.750.000,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.763.333,34	122.071.166,67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.665.700,00	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.316.666,67	
Sekretariat Daerah	49.830.000,00	
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.266.666,68	29.916.666,67
Jumlah	183.882.366,69	155.277.833,34

5.4.2.10. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	638.000.000,00
Jumlah	638.000.000,00	638.000.000,00

5.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Pada Tahun 2021 rekening Beban Transfer Bantuan Keuangan pindah ke Beban Hibah Uang kepada pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan Tahun 2022 Beban Transfer Keuangan sebesar Rp3.420.738.400,00 yang merupakan utang bantuan keuangan untuk transponder TVRI dan TMII serta beban premi BPJS Kesehatan.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Tranponder TVRI (Utang tahun 2022)	245.000.000,00	-
Beban Biaya Pemeliharaan TMII (Utang tahun 2022)	240.000.000,00	-



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Premi Asuransi Kesehatan BPJS	2.935.738.400,00	-
Jumlah	3.420.738.400,00	0,00

5.4.2.12. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pada Tahun 2022 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa telah dilaksanakan sebesar Rp57.720.612.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Premi Askes	-	4.757.839.800,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah ke Desa	25.789.108.000,00	52.981.861.000,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa	31.931.504.400,00	
Jumlah	57.720.612.400,00	57.739.700.800,00

5.4.2.12.1. Beban Bantuan Premi Akses

Beban Transfer Bantuan Premi Askes pada tahun 2022 telah berpindah rekening ke Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI, sedangkan pada tahun 2021 terdapat beban transfer bantuan keuangan premi askes sebesar Rp4.757.839.800,00.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Premi Askes	-	4.757.839.800,00
Jumlah	-	4.757.839.800,00

5.4.2.12.2. Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2022 dan 2021 terdiri atas akun berikut ini.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan ADD	25.789.108.000,00	50.501.561.000,00
Beban Bantuan Keuangan Tunjangan Kehormatan BPD/LKMK	-	644.100.000,00
Beban Bantuan Keuangan Insentif Damang dan Sekretaris Damang	-	1.836.200.000,00
Jumlah	25.789.108.000,00	52.981.861.000,00

5.4.2.12.3. Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah ke Desa	31.931.504.400,00	4.757.839.800,00
Jumlah	31.931.504.400,00	4.757.839.800,00

5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	1.293.738.743.739,96	1.100.775.600.366,60
Beban	1.069.134.858.171,82	1.018.913.820.703,02



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah	224.603.885.568,14	81.861.779.663,58
--------	--------------------	-------------------

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 defisit sebesar Rp2.834.980.893,12, sedangkan pada TA 2021 bernilai Rp5.924.367.902,99. Surplus dari Kegiatan Non Operasional ini berasal dari pengakuan pendapatan lelang aset sebesar Rp718.058.223,00 sedangkan defisit dari kegiatan Non Operasional adalah pengakuan kerugian PDAM karena metode ekuitas sebesar Rp2.675.787.300,00 dan juga adanya pencatatan atas obat yang *expired date* pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai total sebesar Rp877.251.816,12.

5.4.5. Pos Luar Biasa

Berikut rincian Pos Luar Biasa LO.

Uraian	TA 2022	TA 2021
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-
Beban Luar Biasa	657.172.500,00	2.246.133.344,00
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(657.172.500,00)	(2.246.133.344,00)

5.4.5.1. Pendapatan Luar Biasa

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terdapat pada TA 2022 dan TA 2021 tidak terdapat rekening Pendapatan Luar Biasa.

5.4.5.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa TA 2022 merupakan yang merupakan Beban yang berasal dari belanja tidak terduga akibat adanya bencana banjir yang melanda di beberapa wilayah Kabupaten Pulang Pisau. dengan uraian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Beban Tak Terduga	657.172.500,00	2.246.133.344,00
Jumlah	657.172.500,00	2.246.133.344,00

5.4.6. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.111.732.175,02 dan Defisit per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp73.691.278.416,59.

Uraian	2022	2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Surplus Defisit dari Operasi	224.603.885.568,14	81.861.779.663,58	174,37	142.742.105.904,56
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.834.980.893,12)	(5.924.367.902,99)	(52,15)	3.089.387.009,87
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	(657.172.500,00)	(2.246.133.344,00)	(70,74)	1.588.960.844,00
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	221.111.732.175,02	73.691.278.416,59	200,05	147.420.453.758,43



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan dan Non Anggaran serta Saldo Kas pada awal maupun akhir periode anggaran.

5.5.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas Aktivitas Operasi	254.358.311.451,00	262.638.697.089,60	(3,15)	(8.280.385.638,60)
Jumlah	254.358.311.451,00	262.638.697.089,60	(3,15)	(8.280.385.638,60)

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari aktivitas operasi terdiri atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.072.307.814.551,18	1.023.140.745.924,70
Jumlah	1.072.307.814.551,18	1.023.140.745.924,70

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.072.307.814.551,18 dan Rp1.023.140.745.924,70, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	85.181.880.484,10	50.381.636.194,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.798.277.761,00	2.098.379.165,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.017.720.761,00	7.370.086.337,00
Lain-lain PAD yang Sah	32.597.267.410,00	65.468.950.004,19
Dana Bagi Hasil Pajak	24.143.554.050,00	22.892.093.043,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	68.602.516.927,00	46.388.618.296,00
Dana Alokasi Umum	515.284.162.032,00	515.062.491.000,00
Dana Alokasi Khusus	183.238.102.726,00	131.668.755.646,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	83.253.036,00
Dana Penyesuaian	106.317.876.000,00	129.951.650.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.126.456.400,08	31.221.943.168,51
Pendapatan Lainnya	0,00	20.552.890.035,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.072.307.814.551,18	1.023.140.745.924,70



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	817.949.503.100,18	760.502.048.835,10
Jumlah	817.949.503.100,18	760.502.048.835,10

Saldo arus kas keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp817.949.503.100,18 dan Rp760.502.048.835,10, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Pegawai	329.683.273.923,00	353.942.748.132,00
Belanja Barang dan Jasa	333.194.564.335,18	236.005.947.559,10
Belanja Hibah	12.811.867.799,00	8.422.764.190,00
Belanja Bantuan Sosial	415.940.000,00	572.200.000,00
Belanja Tak Terduga	790.310.243,00	6.436.704.154,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	638.000.000,00	638.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	3.180.738.400,00	4.757.839.800,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	137.234.808.400,00	149.725.845.000,00
Transfer Bantuan Keuangan lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	817.949.503.100,18	760.502.048.835,10

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.072.307.814.551,18	1.023.140.745.924,70
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	817.949.503.100,18	760.502.048.835,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	254.358.311.451,00	262.638.697.089,60

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp254.358.311.451,00 dan Rp262.638.697.089,60, turun sebesar (Rp8.280.385.638,60).

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas Aktivitas Investasi	(221.526.615.275,64)	(181.733.214.814,00)	21,90	(39.793.400.461,64)
Jumlah	(221.526.615.275,64)	(181.733.214.814,00)	21,90	(39.793.400.461,64)

5.5.2.1. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi non keuangan selama TA 2022. Pada TA 2022 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp718.058.223,00 merupakan hasil penjualan kendaraan melalui mekanisme lelang terbuka sedangkan untuk TA 2021 tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	222.244.673.498,64	181.733.214.814,00
Jumlah	222.244.673.498,64	181.733.214.814,00

Arus Kas Keluar merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi atau Belanja Daerah yang dapat dikapitalisasi ke aset daerah, dalam hal ini belanja modal pemerintah daerah. Nilai arus investasi keluar selama TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp222.244.673.498,64 dan Rp181.733.214.814,00, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Belanja Tanah	646.810.000,00	1.718.291.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	28.676.649.006,19	25.152.026.214,00
Belanja Gedung dan Bangunan	73.112.943.643,72	56.575.882.640,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.448.436.859,73	96.171.172.860,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	359.833.989,00	115.842.100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	222.244.673.498,64	181.733.214.814,00

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	718.058.223,00	-
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	222.244.673.498,64	181.733.214.814,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(221.526.615.275,64)	(181.733.214.814,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp221.526.615.275,64 dan Rp181.733.214.814,00, turun sebesar Rp39.793.400.461,64.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas aktivitas pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan tersebut dikeluarkan untuk keperluan investasi daerah baik di perusahaan daerah ataupun yang lain. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kembali piutang daerah. Tidak terdapat realisasi atas arus kas tersebut.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan merupakan arus kas masuk atau keluar karena adanya pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pada Arus Kas Keluar karena adanya transaksi terkait dengan pembayaran pokok utang, penanaman modal pemerintah daerah, pemberian pinjaman jangka panjang dan sejenisnya. Pada Transaksi ini, tidak terdapat realisasi Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pembiayaan.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	67.742.721,00	6.490.195,00	943,77	61.252.526,00
Jumlah	67.742.721,00	6.490.195,00	943,77	61.252.526,00

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran, Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	76.978.656.103,00	23.292.950.288,00
Jumlah	76.978.656.103,00	23.292.950.288,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.978.656.103,00 dan Rp23.292.950.288,00, naik sebesar Rp53.685.705.815,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp76.978.656.103,00.

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	76.910.913.382,00	23.286.460.093,00
Jumlah	76.910.913.382,00	23.286.460.093,00

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.910.913.382,00 dan Rp23.286.460.093,00 naik sebesar Rp53.624.453.289,00. Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran merupakan pengeluaran PFK TA 2022.

5.5.4.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran	76.978.656.103,00	23.292.950.288,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran	76.910.913.382,00	23.286.460.093,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	67.742.721,00	6.490.195,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.742.721,00 dan Rp6.490.195,00.

5.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan /penurunan bersih kas selama TA 2022 diperoleh dari penjumlahan dari seluruh aktivitas bersih dalam perhitungan laporan arus kas, dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	254.358.311.451,00	262.638.697.089,60
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(221.526.615.275,64)	(181.733.214.814,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	67.742.721,00	6.490.195,00
Kenaikan/Penurunan Kas	32.899.438.896,36	80.911.972.470,60
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas Dibendahara Pengeluaran	153.238.301.282,19	72.326.328.811,60
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Dibendahara Pengeluaran	186.137.740.178,55	153.238.301.282,20

Saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	150.735.724.490,07	107.665.744.886,53
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi	2.675.062,65	118.442.040,33
Kas dari Dana BOS	95.752.927,37	875.125.580,88
Kas BLUD	35.208.672.851,46	44.571.816.648,46
Kas Lainnya	74.914.847,00	7.172.126,00
Jumlah	186.137.740.178,55	153.238.301.282,20

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Ekuitas Akhir	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27
Jumlah	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29	8,93	189.452.084.637,27

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos sebagai berikut, ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang merupakan dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Saldo Awal Ekuitas	2.121.993.677.698,29	2.056.756.909.360,72	3,17	65.236.768.337,57
Jumlah	2.121.993.677.698,29	2.056.756.909.360,72	3,17	65.236.768.337,57

Ekuitas Awal TA 2022 merupakan saldo ekuitas pada Neraca Audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.121.993.677.698,29 yang terbagi pada SKPD Kabupaten Pulang Pisau dengan rincian sebagai berikut.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	220.435.516.765,88	222.537.416.834,63



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Kesehatan	82.283.837.625,83	81.602.157.517,93
Rumah Sakit Umum Daerah	97.511.396.771,92	60.644.409.248,89
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.116.979.071.710,24	1.286.049.596.904,28
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	12.891.290.093,20	11.584.925.860,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.519.212.984,00	1.334.616.617,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.159.291.728,00	1.148.478.243,00
Dinas Sosial	5.286.112.675,00	5.724.010.694,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.937.130.244,00	5.242.629.811,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.891.221.501,00	11.797.446.810,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	5.499.606.337,00	4.845.477.679,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.461.017.544,00	4.682.046.230,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.229.001.892,00	5.752.387.289,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.174.536.299,20	5.554.880.204,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.177.140.301,00	4.004.596.719,00
Dinas Perhubungan	7.481.743.451,00	7.454.067.818,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan	1.012.370.547,00	1.376.275.845,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	5.086.417.786,44	5.549.741.877,34
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.816.290.314,00	14.946.925.466,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.691.007.605,00	5.703.207.671,00
Dinas Perikanan	12.894.937.975,26	13.627.089.903,80
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.275.174.591,00	3.734.241.471,00
Dinas Pertanian	32.015.398.308,70	34.931.833.615,70
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha	25.347.644.912,77	27.088.848.278,77
Sekretariat Daerah	42.490.185.436,46	42.474.145.446,46
Sekretariat DPRD	13.008.173.974,00	12.545.181.201,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.705.002.027,00	2.967.272.129,00
Kecamatan Jabiren Raya	736.219.028,00	839.930.188,00
Kecamatan Maliku	234.477.067,00	230.164.472,00
Kecamatan Pandih Batu	1.330.023.780,00	1.308.931.620,00
Kecamatan Kahayan Kuala	1.623.562.721,00	1.557.195.522,00
Kecamatan Sebangau Kuala	693.112.709,00	750.495.462,00
Kecamatan Kahayan Tengah	1.335.044.200,00	1.153.200.949,00
Kecamatan Banama Tingang	1.478.427.947,00	1.449.791.826,00
Inspektorat	2.233.682.690,00	1.590.618.913,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	10.762.251.744,00	11.786.067.787,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	195.426.054.689,86	27.960.538.137,53
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	158.221.084.390,53	120.542.714.083,99
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.660.005.331,00	2.683.353.015,00
Jumlah	2.121.993.677.698,29	2.056.756.909.360,72

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Naik/Turun	
			%	Rp
Surplus/Defisit LO	221.111.732.175,02	73.691.278.416,59	200,05	147.420.453.758,43
Jumlah	221.111.732.175,02	73.691.278.416,59	200,05	147.420.453.758,43

Rincian Surplus/(Defisit) – LO TA 2022 sebesar Rp221.111.732.175,02 merupakan Surplus/(Defisit)-LO dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Surplus/defisit dari operasi	224.603.885.568,14	81.861.779.663,58



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(2.834.980.893,12)	(5.924.367.902,99)
Surplus/defisit dari pos luar biasa	(657.172.500,00)	(2.246.133.344,00)
Jumlah	221.111.732.175,02	73.691.278.416,59

Rincian surplus/(defisit) LO pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar Tahun 2022 sebesar Rp31.659.647.537,75 dijelaskan sebagai berikut.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Koreksi Saldo awal Aset Tetap	-	175.180.000,00
Koreksi Saldo awal Persediaan	(540.500,00)	-
koreksi dan Mutasi persediaan	(2.562.400,00)	-
Koreksi dan penyesuaian Piutang	(31.266.396.632,00)	1.254.433.144,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(16.170.168,00)	7.869.596.485,97
Penyesuaian Aset Lain-lain	-	(15.000.000,00)
Mutasi , Koreksi dan penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Pendek	1.902.007,26	61.312.097,00
Koreksi Nilai Penyertaan Modal	-	(5.098.224.486,00)
Penyesuaian KAS	(681.931,008)	0,008
Mutasi Aset Tetap	-	(11.482.080.000,00)
Koreksi Aset yang masuk kategori ekstrakomtabel	(375.197.914,00)	(1.219.727.320,00)
Jumlah	(31.659.647.537,75)	(8.454.510.079,02)

1. Koreksi saldo awal Aset Persediaan

Koreksi Saldo Awal Persediaan terjadi pada Dinas Pertanian sebesar Rp540.500,00 berupa koreksi atas saldo awal persediaan obat-obatan lainnya Dinas Pertanian akibat adanya kelebihan catat pada saldo persediaan obat dinas pertanian per 31 Desember 2021.

2. Koreksi dan Mutasi Persediaan

Koreksi dan Mutasi Persediaan terdapat pada DPUPR sebesar Rp2.562.400,00 berupa koreksi atas kesalahan penghitungan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tahun 2021 yang dicatat sebesar Rp14.468.892.374,00 dimana seharusnya sebesar Rp14.471.454.774,00 sehingga terdapat selisih kurang catat sebesar Rp2.562.400,00.

3. Koreksi dan Penyesuaian Piutang



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Koreksi dan Penyesuaian Piutang TA 2022 sebesar Rp31.266.396.632,00 yang merupakan penyesuaian Piutang yang terdapat pada SKPD berikut ini:

- a. Pembayaran atas piutang TPTGR sebesar Rp5.000.000,00 Dinas Pendidikan yang mana pendapatannya tercatat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Koreksi Saldo awal Piutang Rumah Sakit Umum Daerah BLUD pada piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp151.171,00
- c. Pembayaran atas Uang Muka Pengadaan Barang dari PT PKR atas peningkatan Jalan Sebangau Permai-Sebangau Mulya sebesar Rp564.580.000,00 yang mana pengembalian uang muka di Laporan Realisasi Anggaran dicatat sebagai pendapatan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Terdapat koreksi atas piutang BPHTB untuk PT SCP berdasarkan pada SK Bupati Pulang Pisau Nomor 566 tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPD-BPHTB) PT SCP Nomor 03/SKPD-BPHTB/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 Tahun 2022 yang tadinya dicatat sebesar Rp96.983.548.556,00 berubah menjadi Rp81.342.509.486,00 dimana selisih keduanya sebesar Rp15.641.039.070,00.
- e. Terdapat koreksi piutang dari PT BAF berdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 322 Tahun 2022 tentang Pembetulan Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPD-BPHTB) PT BAF Nomor 03/SKPD-BPHTB/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 yang semula sebesar Rp23.126.192.155,00 menjadi Rp7.500.947.730,00 berkurang sebesar Rp15.625.244.425,00.
- f. Koreksi atas pendapatan pada BPPKAD karena merupakan pembayaran atas piutang Tuntutan Ganti Kerugian Bendaharan Dinas Pendidikan sebesar Rp5.000.000,00 dan Pembayaran Uang Muka Pengadaan Barang dan jasa Dinas Pekerjaan umum sebesar Rp564.580.000,00.

4. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 sebesar Rp16.170.168,00 akibat adanya koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 1 Januari 2022 yang disebabkan karena adanya mutasi aset tetap antar OPD dan atribusi Aset tetap yang terdapat pada SKPD berikut ini.

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	(255.621.667,00)
Dinas Kesehatan	135.749.257,00
Rumah Sakit Umum Daerah	(135.749.257,00)



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(69.143.959,01)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(31.680.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(15.840.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(359.240.000,00)
Dinas Perhubungan	(579.300.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.763.791,00
Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	1.330.406.901,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13.020.833,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	220.793.100,01
Sekretariat DPRD	(327.329.167,00)
Kecamatan Kahayan Tengah	8.000.000,00
Jumlah	(16.170.168,00)

5. Mutasi , Koreksi dan penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka Pendek

Koreksi Kewajiban Jangka Pendek terjadi karena adanya lebih catat atau kurang catat atas Kewajiban Jangka Pendek tahun anggaran sebelumnya. Koreksi nilai Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021 sebesar Rp1.902.007,26 yang terjadi pada SKPD sebagai berikut.

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan	4.112.600,00
Rumah Sakit Umum Daerah	3.906.179,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(20.000,00)
Dinas Pertanian	(40.000,00)
Sekretariat Daerah	5.313.227,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(11.369.998,74)
Jumlah	1. 902.007,26

6. Penyesuaian Kas

Kas lainnya sebesar Rp681.931,00 merupakan sisa belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Swakelola Dinas Pendidikan yang dibelanjakan dalam bentuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 sebesar Rp21.755,00 dan tahun 2020 sebesar Rp660.176,00 yang seharusnya disetorkan kembali ke Kas Negara, akan tetapi setelah dilakukan konsultasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kantor Wilayah Palangka Raya disarankan untuk menyetorkan ke Kas Daerah. Dinas Pendidikan kemudian melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebagai Lain-lain PAD yang Sah.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pada awal pencatatan kas lainnya diakui sebagai pengurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam neraca, untuk itu saat dilakukan penyeteroran dimana terdapat pengakuan Kas daerah dan juga Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, sehingga untuk menghapus kas lainnya diperlukan akun koreksi ekuitas.

7. Koreksi Aset yang masuk kategori ekstrakomtabel

Koreksi Aset yang Masuk Kategori Ekstrakomtabel TA 2022 sebesar Rp375.197.914,00 yang terdapat pada SKPD berikut ini.

SKPD	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	(354.743.880,00)
Dinas Kesehatan	(9.721.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah	(6.046.170,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(4.686.864,00)
Jumlah	(375.197.914,00)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2022 adalah sebesar Rp2.311.445.762.335,56 yang terdapat pada SKPD berikut ini.

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dinas Pendidikan	212.336.586.046,37	220.435.516.765,88
Dinas Kesehatan	83.840.105.866,34	82.283.837.625,83
Rumah Sakit Umum Daerah	123.444.368.906,17	97.511.396.771,92
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.323.897.947.381,31	1.116.979.071.710,24
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	12.570.343.368,20	12.891.290.093,20
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan	1.693.959.546,00	1.519.212.984,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.245.488.130,00	1.159.291.728,00
Dinas Sosial	4.886.928.920,99	5.286.112.675,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.689.847.683,00	5.937.130.244,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.741.499.940,33	9.891.221.501,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	5.763.510.672,00	5.499.606.337,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.968.660.535,00	4.461.017.544,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.517.233.334,00	5.229.001.892,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.342.805.677,20	5.174.536.299,20
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.899.398.006,00	4.177.140.301,00
Dinas Perhubungan	7.058.278.645,00	7.481.743.451,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan	988.523.078,00	1.012.370.547,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	4.472.966.313,55	5.086.417.786,44
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.928.315.698,00	14.816.290.314,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.208.061.064,00	5.691.007.605,00
Dinas Perikanan	12.891.188.071,21	12.894.937.975,26
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.038.472.860,00	4.275.174.591,00
Dinas Pertanian	21.480.792.274,70	32.015.398.308,70
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha	24.059.309.875,49	25.347.644.912,77
Sekretariat Daerah	42.062.393.430,90	42.490.185.436,46
Sekretariat DPRD	12.078.103.836,00	13.008.173.974,00
Kecamatan Kahayan Hilir	2.685.352.843,00	2.705.002.027,00
Kecamatan Jabiren Raya	654.201.944,00	736.219.028,00
Kecamatan Malikul	233.203.093,00	234.477.067,00
Kecamatan Pandih Batu	1.477.363.233,00	1.330.023.780,00



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Kecamatan Kahayan Kuala	1.944.174.483,00	1.623.562.721,00
Kecamatan Sebangau Kuala	574.822.351,00	693.112.709,00
Kecamatan Kahayan Tengah	1.259.618.365,00	1.335.044.200,00
Kecamatan Banama Tingang	1.390.842.986,00	1.478.427.947,00
Inspektorat	3.419.031.279,00	2.233.682.690,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	9.761.465.995,00	10.762.251.744,00
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	82.915.058.202,89	195.426.054.689,86
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	249.736.816.223,91	158.221.084.390,53
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.288.722.177,00	2.660.005.331,00
Jumlah	2.311.445.762.335,56	2.121.993.677.698,29



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas 38 Organisasi Perangkat Daerah yaitu.

No	Kode	Uraian
	5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	5.1.01	PENDIDIKAN
1	5.1.01.1-01.0-00.0-00.01	Dinas Pendidikan
	5.1.02	KESEHATAN
2	5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan
3	5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah
	5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
	5.1.06	SOSIAL
7	5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	Dinas Sosial
8	5.1.06.1-06.1-05.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	5.2.07	TENAGA KERJA
9	5.2.07.2-07.3-32.0-00.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.2.09	PANGAN
11	5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	Dinas Ketahanan Pangan
	5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP
12	5.2.11.2-11.3-28.0-00.01	Dinas Lingkungan Hidup
	5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	5.2.15	PERHUBUNGAN
15	5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan
	5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA
16	5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Catatan atas Laporan Keuangan (Audited)
Kabupaten Pulang Pisau
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian
	5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
17	5.2.17.2-17.3-30.3-31.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.2.18	PENANAMAN MODAL
18	5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
19	5.2.19.2-19.0-00.0-00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	5.2.22	KEBUDAYAAN
20	5.2.22.2-22.3-26.0-00.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5.2.23	PERPUSTAKAAN
21	5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan
	5.3.27	PERTANIAN
23	5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	Dinas Pertanian
	5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH
24	5.4.01.4-01.3-29.5-06.01	Sekretariat Daerah
	5.4.02	SEKRETARIAT DPRD
25	5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD
	5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.5.01	PERENCANAAN
26	5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	5.5.02	KEUANGAN
27	5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.5.03	KEPEGAWAIAN
28	5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
	5.6.01	INSPEKTORAT
29	5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat
	5.7	UNSUR KEWILAYAHAN
	5.7.01	KECAMATAN
30	5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Kahayan Hilir
31	5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Jabiren Raya
32	5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Maluku
33	5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Pandih Batu
34	5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Kahayan Kuala
35	5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Sebangau Kuala
36	5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Kahayan Tengah
37	5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Banama Tingang



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

No	Kode	Uraian
	5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
38	5.8.01.8-01.1-05.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6.2. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dalam rangka percepatan rekrutmen peserta menuju *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendaftarkan 9.972 peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan Berita Acara antara Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Nomor 4784/BA/VIII-06/1221 dan 1145/440/Kes-PP/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.

Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun untuk masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 ditetapkan dengan SK Bupati Pulang Pisau Nomor 237 Tahun 2022. Belanja yang sudah dibayarkan ke BPJS Kesehatan dengan layanan pada kelas III adalah sebesar Rp4.798.222.800,00 pada tahun 2022.

6.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/ kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif. Hal yang paling menonjol dalam UU 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh Pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pulang Pisau diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Pulang Pisau merupakan pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor: BA-33/WPJ.29/KP.03/2014. Pada tahun 2022 terdapat 51.754 wajib pajak yang terdaftar pada aplikasi SISMIOP Kabupaten Pulang Pisau.



Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*)

Kabupaten Pulang Pisau

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Per 31 Desember 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan (LK) dan CaLK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan CaLK mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Pengakuan Aktiva (Aset), Utang (Kewajiban), dan Ekuitas Dana;
3. CaLK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LK dan CaLK Tahun Anggaran (TA) 2022. Adapun akun-akun neraca yang dijelaskan hanya berkaitan pada pos-pos yang memiliki nilai transaksi terkait dengan APBD TA 2022;
4. Diharapkan dengan diterbitkannya LK dan CaLK, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan daerah yang tergambar dalam Laporan Keuangan, maupun pihak internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sendiri dalam pengambilan keputusan;
5. Atas jumlah Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2022, dalam penyusunannya sampai kepada penetapan jumlahnya tidak dilakukan penilaian atas Aset Tetap oleh Lembaga Penilaian Independen. Jumlah yang tercantum dalam Neraca adalah kompilasi dari saldo awal Aset Tetap per 1 Januari 2022 ditambah/dikurangi mutasi Belanja Modal dalam TA 2022 dan beberapa mutasi Aset Tetap;
6. Dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan jumlah aset tetap Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, pada kesempatan ini kami usulkan untuk dilakukan penilaian atas aset tetap oleh Lembaga Penilai yang Independen dengan tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan daerah.

Demikian LK dan CaLK Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PULANG PISAU



PUBJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN